

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



Kementerian Kelautan dan Perikanan

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima

KATA PENGANTAR



Kinerja organisasi wajib dilaporkan sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas fungsi yang dilaksanakan dan dituangkan dalam **Laporan Kinerja (Lkj)**. Hal tersebut sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2025, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima berhasil menunjukkan capaian kinerja yang membanggakan, dengan perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **111,13%** dan predikat **"Istimewa"**. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi seluruh pimpinan serta pegawai di lingkungan Stasiun KIPM Bima. Atas capaian tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai Stasiun KIPM Bima.

Saya meyakini bahwa, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, dengan semangat kebersamaan dan berpegang pada semboyan **"SIAP Melayani"** kita akan mampu menuntaskan setiap amanah dan penugasan dengan sebaik-baiknya. Sebagai garda terdepan dalam mengawal mutu dan keamanan hasil perikanan, Stasiun KIPM Bima memiliki peran strategis dalam mengawal keberhasilan ekonomi biru guna mewujudkan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam **menjaga laut, menopang ketahanan pangan, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045**.

Bima, 15 Januari 2026
Kepala Stasiun KIPM Bima,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Jonison Petrus, S.St,Pi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	4
1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.....	5
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1 Rencana Strategis Stasiun KIPM Bima.....	7
2.2 Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Bima	8
2.3 Pengukuran Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1 Capaian Kinerja Stasiun KIPM Bima.....	10
3.2 Analisis dan Evaluasi.....	12
3.3 Efisiensi	38
3.4 Akuntabilitas Keuangan	39
BAB IV PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Langkah-Langkah Perbaikan	40
BAB V LAMPIRAN	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Bima	5
Gambar 3. Peta Strategis Stasiun KIPM Bima Tahun 2025.....	7
Gambar 4. Capaian Kinerja pada Aplikasi Kinerjaku KKP	10
Gambar 5. Kegiatan Inspeksi di CV. Alfa Segara Makmur di Kab.Dompu NTB ...	18
Gambar 6. Kegiatan Zoom Meeting bersama PT. Mitradelta Bahari Pratama.....	19
Gambar 7. Kegiatan Inspeksi CPIB Kapal di wilayah Pulau Seraya	19
Gambar 8. Kegiatan Inspeksi CBIB di Lokasi PT. Mitradelta Pratama Bahari.....	19
Gambar 9. Surveilen CBIB secara Remote Inspection di Lokasi CV. Sape Sukses Bersama	20
Gambar 10. Kegiatan K3 bersama Penyuluh Perikanan Kabupaten Bima.....	20
Gambar 11. Kegiatan Surveilen CBIB di Subhan Farm dan Abdul Khalik Farm...	21
Gambar 12. Kegiatan Inspeksi CPIB Kapal.....	21
Gambar 13. Kegiatan Menghadiri Undangan Dinas Kelautan dan Perikanan	22
Gambar 14. Kegiatan Surveilen PT. Berkat Nisa Sura Bima	26
Gambar 15. Tabel Perbandingan Jumlah Sertifikat Ekspor ke Negara Tujuan Tahun 2024 dan 2025.....	28
Gambar 16. IP ASN Stasiun KIPM Bima	31
Gambar 17. IP ASN Pegawai Stasiun KIPM Bima	32
Gambar 18. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP pada Stasiun KIPM Bima	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian IKU Stasiun KIPM Bima Tahun 2025	v
Tabel 2. Isu strategis, tantangan, dan strategi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 2025-2029	5
Tabel 3. Sistematika Laporan Kinerja	6
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun 2025	8
Tabel 5. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Bima pada Tahun 2025.....	11
Tabel 6. Target dan Capaian IKU 1	13
Tabel 7. Data CPIB Kapal UPT Stasiun KIPM Bima	15
Tabel 8. Data CPIB Kapal UPT Stasiun KIPM Bima	16
Tabel 9. Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi CPIB Kapal dan CBIB Tahun 2025.....	22
Tabel 10. Target dan Capaian IKU 2	25
Tabel 11. SKHS HACCP Tahun 2025	26
Tabel 12. Tabel Perbandingan Jumlah Sertifikat Ekspor ke Negara Tujuan Tahun 2024 dan 2025.....	27
Tabel 13. Target dan Capaian IKU 3	29
Tabel 14. Target dan Capaian IKU 4	30
Tabel 15. Target dan Capaian IKU 5	32
Tabel 16. Target dan Capaian IKU 6	34
Tabel 17. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	35
Tabel 18. Target dan Capaian IKU 7	36
Tabel 19. Target dan Capaian IKU 8	38
Tabel 20. Anggaran dan Realisasi Stasiun KIPM Bima	39

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Stasiun KIPM Bima digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun 2025. Melalui perjanjian kinerja tersebut, Stasiun KIPM Bima menetapkan 2 (dua) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi target Stasiun KIPM Bima di Tahun 2025.

Nilai Kinerja Organisasi Stasiun KIPM Bima Tahun 2025 mencapai **111,13%**, dengan kategori “**Istimewa**” yang diperoleh dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan targetnya pada Tahun 2025. Secara ringkas capaian kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 1 Capaian IKU Stasiun KIPM Bima Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025						%
			TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II	CAPAIAN TW III	CAPAIAN TW IV	CAPAIAN TAHUN	
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	-	100	100	420	420	120
		2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	-	100	100	100	100	120
		3 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	99	100	100	100	100	100	101,01

3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	100	-	-	-	100	100	100
		5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Indeks)	82	-	87,83		89	89	108,54
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	85	100	100	100	100	100	117,65
		7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	3,36	-	-	-	3,90	3,90	116,07
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	86	-	-	-	86,55	86,55	100,64

Keberhasilan pencapaian kinerja Stasiun KIPM Bima didukung oleh pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang dilakukan secara konsisten melalui kegiatan sertifikasi, inspeksi, surveilans, monitoring, pengambilan sampel, serta pembinaan kepada pelaku usaha perikanan. Selain itu, capaian kinerja juga didukung oleh pemanfaatan media informasi dan media sosial sebagai sarana edukasi dan diseminasi informasi terkait jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Alokasi anggaran awal Stasiun KIPM Bima tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp2,754,000,000,-. Dari total anggaran tersebut, anggaran Stasiun KIPM Bima kelola oleh Balai KIPM Mataram dikarenakan pada tahun anggaran 2025 Stasiun KIPM Bima sudah tidak memiliki DIPA.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Arah kebijakan pemerintahan periode 2020-2024 akan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN ini menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan potensi strategis nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Hal itu didukung pula oleh arah kebijakan presiden dan wakil presiden 2020-2024 yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai tujuan tersebut, disusunlah 8 misi Astra Cita sebagai agenda prioritas nasional, antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur.

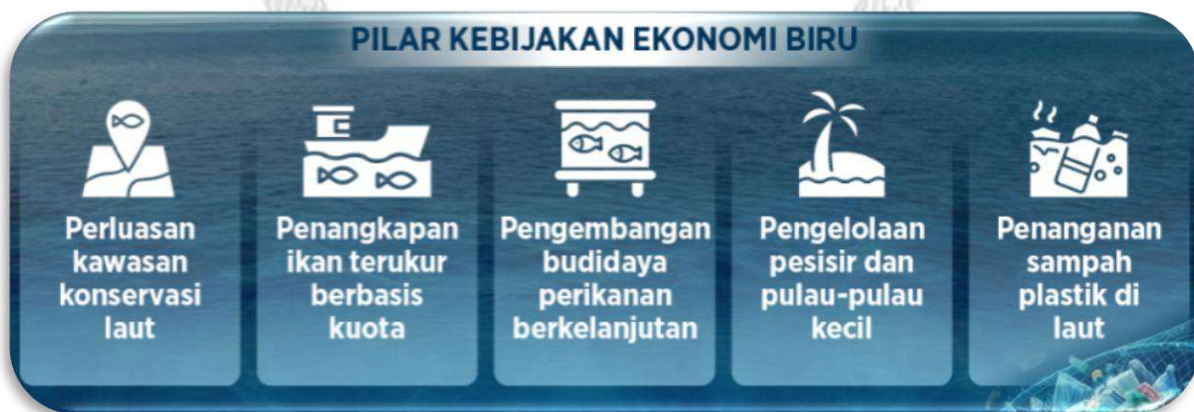
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung Misi Asta Cita ke-2 hingga ke-8, terutama Misi Astacita ke-2, 5, dan 8.

Selain misi Astacita, terdapat pula 17 Program Prioritas RPJMN 2020-2024 disusun untuk mewujudkan kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, antara lain:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan, kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan sains, dan teknologi serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida, langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah dan, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;

17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Dalam 17 program prioritas tersebut, KKP berperan dalam program nomor 1 (swasembada pangan), 5 (pemberantasan kemiskinan), 11 (pelestarian lingkungan hidup), dan 15 (hilirisasi berbasis sumber daya alam termasuk sumber daya maritim). Melalui strategi ini, pemerintah berkomitmen untuk memajukan Indonesia menuju negara yang lebih maju, adil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Lebih lanjut, KKP telah melakukan transformasi kebijakan tata kelola pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru dengan menempatkan ekologi sebagai panglima serta menjaga keseimbangan antara aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Keseimbangan interaksi kedua aspek tersebut akan berbuah kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Ekonomi biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sangat menekankan kepada vitalnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem laut secara keseluruhan. Selain mengutamakan menjaga kesehatan laut, kebijakan strategis ini juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional karena distribusi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Adapun detail kebijakan Ekonomi Biru sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1 Kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kebijakan ekonomi biru yang dijalankan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berfokus pada jaminan mutu, keamanan, dan peningkatan daya saing produk perikanan, guna mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan tanpa merusak ekosistem.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Visi

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

B. Misi

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring;
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan;
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Bima mempunyai tugas Menyelenggarakan Pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan., Stasiun KIPM Bima menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Bima, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Stasiun KIPM Bima saat ini berjumlah 12 orang pegawai, dengan komposisi pegawai ASN 5 orang di kantor Stasiun KIPM Bima, yang dibantu oleh 1 Orang PPPK Penuh Waktu, 3 Orang PPPK Paruh Waktu dan 2 Orang tenaga kontrak (PJLP). Distribusi pegawai tidak seimbang namun tetap harus membentuk *workforce* yang efektif dan efisien.



Gambar 2 Struktur Organisasi Stasiun KIPM Bima

1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Strategi pelaksanaan dalam mendukung kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berfokus pada peningkatan mutu produk perikanan melalui empat program utama yang tertuang pada Tabel 2.

Tabel 2 Isu strategis, tantangan, dan strategi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 2020-2024

No	Isu Strategis	Tantangan	Strategi Pelaksanaan
1	Manajemen Mutu	Standar pengujian laboratorium belum merata	Penerapan standar laboratorium dan quality assurance sesuai regulasi
2	Pengawasan Mutu Produksi Primer	Rendahnya kepatuhan unit usaha terhadap sertifikasi mutu	Peningkatan sertifikasi dan validasi lembaga KP dalam penerapan standar

3	Pengawasan Mutu Pascapanen	Kurangnya sarana pengujian mutu	Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan digitalisasi traceability
4	Dukungan Manajemen	Efisiensi tata kelola internal masih perlu diperkuat	Optimalisasi manajemen, SDM, dan kerja sama lintas sektor

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun KIPM Bima diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3 Sistematika laporan kinerja

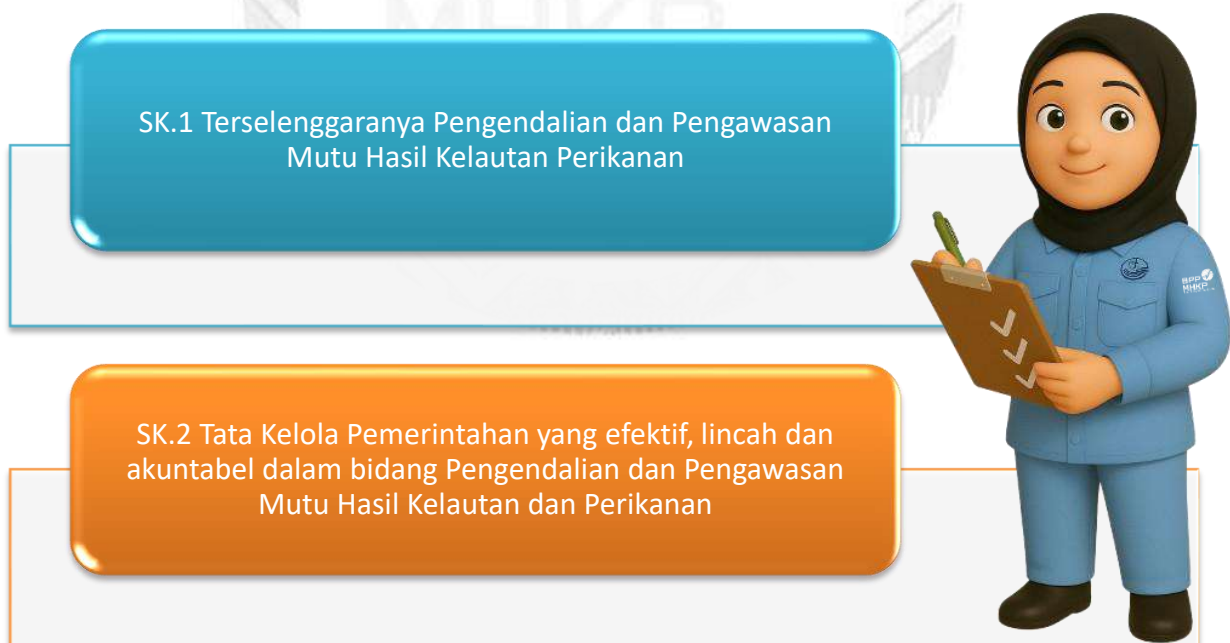
BAB I PENDAHULUAN	Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Stasiun KIPM Bima, serta struktur organisasi Stasiun KIPM Bima
BAB II PERENCANAAN KINERJA	Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun 2025
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Stasiun KIPM Bima dan Penetapan Kinerja Tahun 2025
BAB IV PENUTUP	Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Stasiun KIPM Bima

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini dalam proses penyusunan rencana strategis KKP tahun 2020-2024, sehingga penyusunan renstra BPPMHKP menunggu pengesahan Renstra KKP. Sampai dengan akhir Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) BPPMHKP 2020-2024 telah ditetapkan. Dokumen perencanaan tersebut akan membahas tentang perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Gambar 3
Peta Strategis Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Bima
Tahun 2025



2.2 Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Bima

Pada tahun 2025 Stasiun KIPM Bima telah menetapkan 2 (dua) sasaran program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) atas perubahan PK Awal dengan 7 (tujuh) Indikator Utama berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) BPPMHKP tanggal 8 Desember 2025 sebagaimana disajikan berikut:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja
Stasiun KIPM Bima Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	99
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	100
		5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Indeks)	82
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	85
		7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	3,36
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	86

2.3 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Stasiun KIPM Bima dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

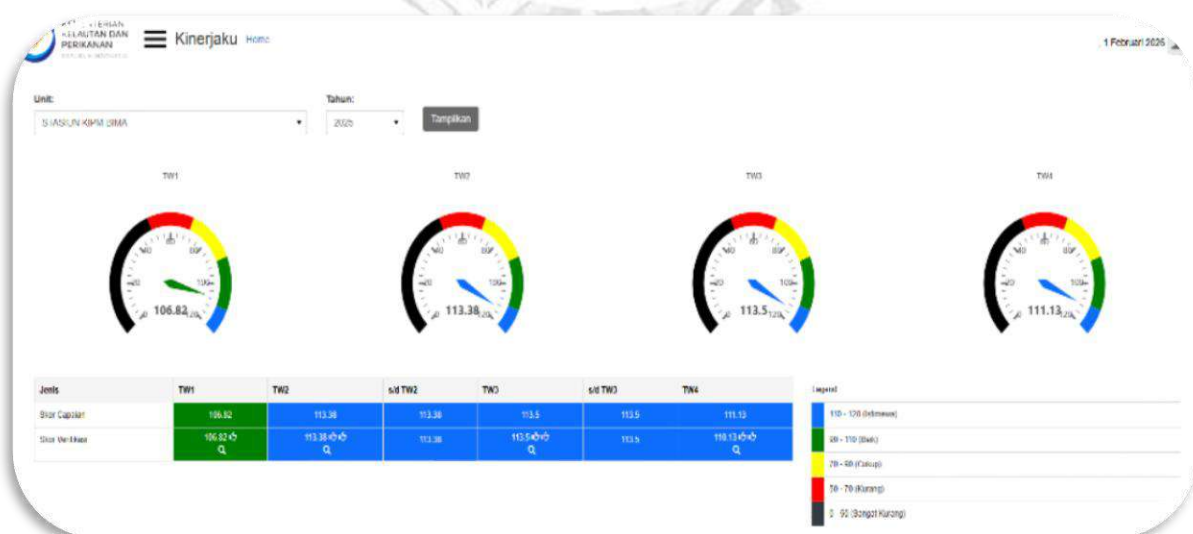
Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id> dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Stasiun KIPM Bima

Stasiun KIPM Bima menetapkan 2 (dua) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang menjadi target Stasiun KIPM Bima di Tahun 2025. Pada Tahun 2025, dari 8 (delapan) IKU semua target telah tercapai, yakni: 1) Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Bima; 2) Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Bima; 3) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima; 4) Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bima; 5) Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bima; 6) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun KIPM Bima; 7) Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bima; 8) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima. Berdasarkan verifikasi dan validasi terhadap 8 (delapan) IKU tersebut, Nilai Kinerja Organisasi Stasiun KIPM Bima pada Tahun 2025 mencapai **111,13%**, dengan kategori “**Istimewa**”. Capaian kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:



Gambar 4 Capaian Kinerja pada Aplikasi Kinerjaku KKP

Tabel 5
Capaian Kinerja Stasiun KIPM Bima pada Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025						%
			TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II	CAPAIAN TW III	CAPAIAN TW IV	CAPAIAN TAHUN	
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	-	100	100	420	420	120
		2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	-	100	100	100	100	120
		3 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	99	100	100	100	100	100	101,01
3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4 Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	100	-	-	-	100	100	100
		5 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Indeks)	82	-	87,83		89	89	108,54
		6 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	85	100	100	100	100	100	117,65
		7 Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT	3,36	-	-	-	3,90	3,90	116,07

	Stasiun KIPM Bima (Nilai)							
8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	86	-	-	-	86,55	86,55	100,64

3.2 Analisis dan Evaluasi

Sebagai analisis dan evaluasi untuk Capaian kinerja pada Stasiun KIPM Bima meliputi 2 Sasaran Strategi.

Sasaran Strategis 01. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

IKU.1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Tabel 6 Target dan Capaian IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Renstra BPPMHKP 2020-2024 (KEP BADAN NOMOR 29 TAHUN 2024)	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV	%	% Terhadap Target 2024	% Capaian thd Target akhir Renstra
-	-	-	-	-	70	70	420	120	-	120

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BPPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Stasiun KIPM Bima saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah indikator yang mengukur pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E}{xn} \times 100 \%$$

Keterangan :

- X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B = Persentase Unit menerapkan CPIB
- C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
- E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- F = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Pada Tahun 2025 IKU Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan dilakukan perhitungan

oleh Pusat Mutu Produksi Primer melalui perhitungan Tingkat Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pusat Mutu Produksi Primer Tahun 2025. Realisasi Indikator Kinerja Stasiun KIPM Bima terhadap Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan sebesar **420 Persen** dari target **70 Persen** berdasarkan Data Laporan Capaian Kinerja dari Ketua Tim Kerja Produksi Primer, yaitu :

- a. Kegiatan Inspeksi CPIB Kapal terdapat 33 kegiatan Inspeksi, sebanyak 10 kapal dilaksanakan pada 21 Juli 2025 dengan ukuran kapal di bawah 5 GT berlokasi di Pulau Seraya Besar Kabupaten Manggarai Barat Labuan Bajo. Kegiatan Inspeksi dilaksanakan secara Self Assesment oleh WWF dengan didampingi Inspektur Mutu yang berada di Labuan Bajo dan diikuti secara Remot oleh Inspektur Mutu di kantor Stasiun KIPM Bima. Adapun nama-nama kapal sebagai berikut :

Tabel 7 Data CPIB Kapal UPT Stasiun KIPM Bima

NO	NAMA KAPAL	NIB	ALAMAT (PADA NIB)	UKURAN KAPAL	TIPE KAPAL (PENANGKAP/ PENGANGKUT)	NAMA PEMILIK KAPAL	NO.TDKP/ EBKPNK/S KKP
1	KMN. Rivan	3062200 55718	Pulau Seraya Besar, Desa/kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai barat	1 GT / 9 x 0.65 x 0.75 m	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Baco	46.22.5397. 56.00388
2	KMN. Merpati	4082200 23839	Pulau Seraya Besar, Desa/kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai barat	1 GT / 7.00 x 0.45 x 0.60 m	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Fajri	46.22.5397. 56.00375
3	KMN. Kura-Kura Putih	1309220 000528	Pulau Seraya Besar, Desa/kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai barat	1 GT / 5.00 x 0.40 x 0.55 m	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Halim	46.22.5397. 00.00644
4	KMN. Sahdika	0906220 010581	Pulau Seraya Besar, Desa/kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai barat	1 GT / 7.00 x 0.50 x 0.55 m	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Jaenudin	45.20.5397. 325.01258
5	KMN. Beke Aku	0408220 027463	Pulau Seraya Besar, Desa/kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai barat	1 GT / 7.25 x 0.60 x 0.49 m	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Taking	46.22.5397. 56.00647
6	KMN. Riana	1204220 015284	Pulau Seraya Besar, Desa/kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai barat	1 GT / 8.50 x 0.67 x 0.60 m	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Nurkharun Syah	46.22.5397. 56.00392
7	KMN. Safa Marwa	2004220 017959	Pulau Seraya Besar, Desa/kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai barat	1 GT / 7.80 x 0.60 x 0.59 m	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Safrudin	46.22.5397. 56.00379
8	KMN. FURGAN	0108220 028731	Pulau Seraya Besar, Desa/kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai barat	1 GT / 6.8 x 0.68 x 0.45 m	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Sahrudin	46.22.5397. 56.00684

9	KMN. ALUCA RD	0108220 034276	Pulau Seraya Besar, Desa/kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai barat	1 GT / 7.5 x 0.50 x 0.55 m	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Samsul	46.22.5397. 56.00383
10	KMN. DUAF AN	1508220 016474	Pulau Seraya Besar, Desa/kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai barat	1 GT / 98.5 x 0.66 x 0.48 m	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Sunardi	46.22.5397. 56.00410

Sumber Data : Aplikasi SIAP MUTU

- b. Sebanyak 23 Kapal di bawah 5 GT, dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus dan 29 Agustus 2025 berlokasi di Pulau Seraya Besar, Desa/kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dengan data sebagai berikut :

Tabel 8 Data CPIB Kapal UPT Stasiun KIPM Bima

NO	NAMA KAPAL	NIB	ALAMAT (PADA NIB)	UKURAN KAPAL	TIPE KAPAL (PENANGKAP/ PENGANGKUT)	NAMA PEMILIK KAPAL	NO.TDKP/ EBKPNK/S KKP
1	KMN. ALFIN	2903220 017284	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	ABDUL HARIS	45.20.5397.3 25.01188
2	KMN. ROSSI	2807220 031676	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTB	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Ahmad	46.22.5397.5 6.00381
3	KMN. TUNAS MUDA	5042200 44027	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	AHYA RASID	46.22.5397.5 6.00393
4	KMN. MOBILE LEGEND	2303220 018648	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	AKSA	46.22.5397.5 6.00409
5	KMN. PUTRA TUNGGA L	1309220 000247	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Amir Rudin Sainung	46.22.5397.5 6.00678
6	KMN. SABIL	2062200 41666	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	2 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	ERWIN	46.22.5397.5 6.00387
7	KMN. NURUL HUMAIR AH	0108220 043186	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Hariyanto	46.22.5397.0 0.00649
8	KMN. CENDR AWASIH	0408220 016674	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Jabarudin	46.222.5397. 00.00650

9	KMN. CAMEL	3003230 004054	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	KAMMA	45.20.5397.3 25.01146
10	KMN. RAFKI	1204220 039933	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Lahumma	46.22.5397.5 6.00403
11	KMN. AZAM	2062200 39067	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	LIHONG	46.22.5397.5 6.00400
12	KMN. ASRI JAYA	3005220 035366	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Mamma	46.22.5397.5 6.00386
13	KMN. ALIFA	2006220 017239	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Mammang	45.20.5397.3 25.01275
14	KMN. ANISA	0306220 058745	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab, Manggarai Barat, Provinsi NTB	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Mursalin	46.22.5397.5 6.00389
15	KMN. SNIPER	0408220 019701	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	NASARUDIN	46.22.5397.5 56.00646
16	KMN. NUR HUMAIR AH	0906220 030662	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Ramling Latuo	46.22.5397.5 6.00367
17	KMN. LABOGA	2111220 0 03321	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab, Manggarai Barat, Provinsi NTB	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Rasid	46.23.5397.5 6.00161
18	KMN. KITING	0108220 029495	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	RONI Kurniawan	46.22.5397.0 0.00645
19	KMN. ANISA	0306220 060545	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	RUSLAN	46.22.5397.5 6.00382
20	KMN. INAYAH INDRIANI	2907220 028145	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Saeda	46.22.5397.5 6.00384
21	KMN. BARUNA	0504220 040846	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab, Manggarai Barat,	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	SAHAM MANG	6.22.5397.56 .00394

			Provinsi Nusa Tenggara Barat				
22	KMN. ANSEBAR	1082200 30924	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	SAMAN SUR	45.20.5397.3 25.01190
23	KMN. REPSOL	4062200 12936	Pulau Seraya Besar, Desa/Kelurahan Seraya Marannu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 GT	Penangkap Pisces/Ikan Bersirip di laut	Sumarlin	46.22.5397.5 6.00372

Sumber Data : Aplikasi SIAP MUTU

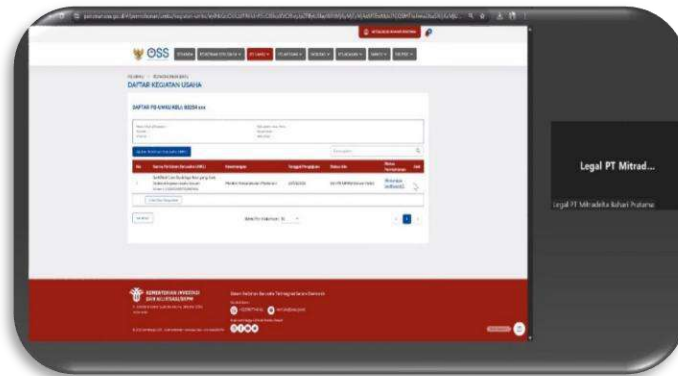
c. Kegiatan CBIB dilaksanakan pada 5 lokasi yaitu :

- Pelaksanaan Inspeksi pada tanggal 16 Juli 2025 Lokasi CV. Alfa Segara Makmur di Kabupaten Dompu NTB, dengan Kode KBLI (03254) Pembesaran Crustacea Air Payau (Udang Vannamei);



Gambar 5 Kegiatan Inspeksi di CV. Alfa Segara Makmur di Kabupaten Dompu NTB

- Pada tanggal 18 Juli 2025 Inspektur Mutu Stasiun KIPM Bima melakukan zoom meeting dengan pengguna jasa petambak udang PT. Mitradelta Bahari Pratama guna melakukan percepatan sertifikasi Primer;



Gambar 6 Kegiatan Zoom Meeting bersama PT. Mitradelta Bahari Pratama

- Pada tanggal 21 Juli 2025 Inspektur Mutu telah melaksanakan Inpeksi CPIB Kapal sebanyak 10 kapal di wilayah Pulau Seraya Labuan Bajo;



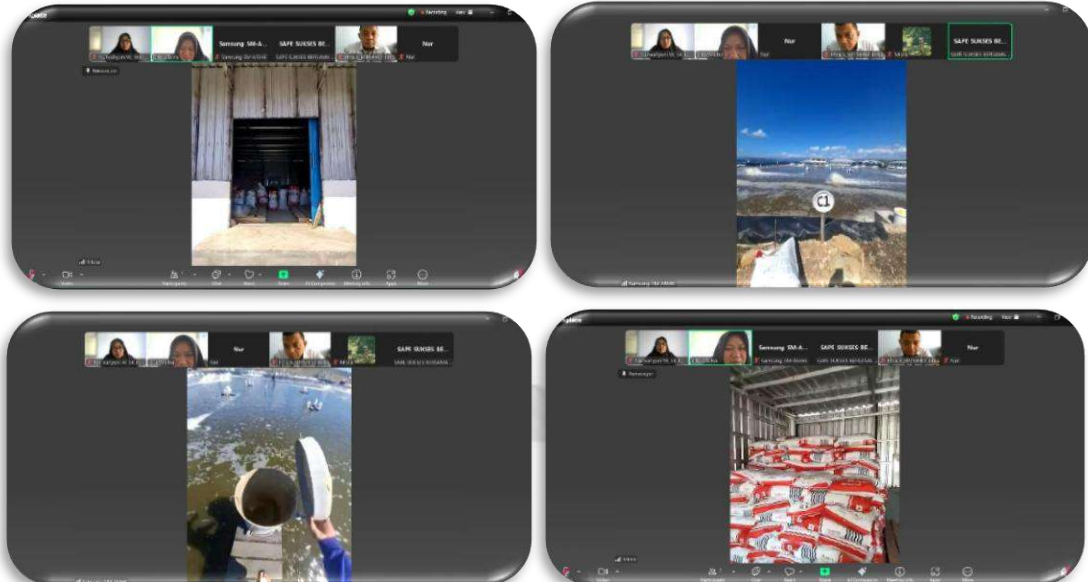
Gambar 7 Kegiatan Inspeksi CPIB Kapal di wilayah Pulau Seraya Labuan Bajo

- Pada tanggal 23 Juli 2025 Inspektur Mutu Stasiun KIPM Bima telah melaksanakan Inspeksi CBIB di Lokasi PT. Mitradelta Pratama Bahari;



Gambar 8 Kegiatan Inspeksi CBIB di Lokasi PT. Mitradelta Pratama Bahari

- Pada tanggal 04 Agustus 2025 Inspektur Mutu Stasiun KIPM Bima telah melaksanakan Surveil CBIB secara Remote Inspection di Lokasi CV. Sape Sukses Bersama;



Gambar 9 Kegiatan Surveil CBIB secara Remote Inspection di Lokasi CV. Sape Sukses Bersama

- Pada tanggal 13 Agustus 2025 Inspektur Mutu Stasiun KIPM Bima melakukan K3 dengan Penyuluh perikanan Kabupaten Bima;



Gambar 10 Kegiatan K3 bersama Penyuluh Perikanan Kabupaten Bima

- Pada tanggal 19 Agustus 2025 Inspektur Mutu Stasiun KIPM Bima telah melaksanakan Surveil CBIB di dua lokasi yang berdekatan Subhan Farm dan Abdul Khalik Farm;



Gambar 11 Kegiatan Surveilen CBIB di Subhan Farm dan Abdul Khalik Farm

- Pada tanggal 28 Agustus dan 29 Agustus 2025 Inspektur Mutu Stasiun KIPM Bima Melaksanakan Inspeksi CPIB Kapal sebanyak 23 Kapal Nelayan dibawah 5 GT dengan cara Self Assesment;



Gambar 12 Kegiatan Inspeksi CPIB Kapal

- Pada tanggal 03 September 2025 Inspektur Mutu Stasiun KIPM Bima menghadiri undangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Perihal Sosialisasi Penyusunan RKU dalam forum tersebut Inspektur Mutu dari Stasiun KIPM Bima menjelaskan persyaratan dan tata cara pengajuan sertifikat CBIB melalui OSS guna Percepatan Sertifikasi CBIB.



Gambar 13 Kegiatan Menghadiri Undangan Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 9 Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi CPIB Kapal dan CBIB Tahun 2025

NO.	NAMA UPR	PRODUK	GRADE	NO. SERTIFIKAT
1	CV. Alfa Segara Makmur	Pembesaran Crustacea Air Payau	B	ID-CBIB-P-52-250172 Tanggal 27 Juli 2025
2	PT. Mitradelta Bahari Pratama	Pembesaran Crustacea Air Payau	B	ID-CBIB-P-52-250178 Tanggal 04 Agustus 2025
3	CV. Sape Sukses Bersama	Pembesaran Crustacea Air Payau	B	ID - CBIB - NB - P - 001026
4	ABDUL KHALIK FARM	Ikan Nilai	C	ID - CBIB - NB - T - 000730
5	SUBHAN FARM	Ikan Nila	C	ID - CBIB - NB - T - 000729
6	KMN. Rivan	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250547
7	KMN. Merpati	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250548
8	KMN. Kura-Kura Putih	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250549
9	KMN. Sahdika	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250550
10	KMN. Beke Aku	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250551
11	KMN. Riana	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250552
12	KMN. Safa Marwa	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250553
13	KMN. FURGAN	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250554
14	KMN. ALUCARD	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250555
15	KMN. DUAFAN	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250556
16	KMN. ALFIN	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250769
17	KMN. ROSSI	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250770
18	KMN. TUNAS MUDA	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250771

19	KMN.MOBILE LEGEND	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250772
20	KMN. PUTRA TUNGGAL	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250773
21	KMN.ASBIL	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250774
23	KMN.NURUL HUMAIRAH	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250775
24	KMN.CENDRAWASIH	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250776
25	KMN.CAMEL	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250777
26	KMN.RAFKI	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250778
27	KMN.AZAM	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250779
28	KMN.ASRI JAYA	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250780
29	KMN.ALIFA	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250781
30	KMN.ANISA	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250782
31	KMN.SNIPER	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250783
32	KMN.NURHUMAIRAH	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250784
33	KMN.LABOGA	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250785
34	KMN.KITING	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250786
35	KMN.ANISA	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250787
36	KMN. INYAH INDRIANI	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250788
37	KMN.BARUNA	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250789
38	KMN.ANSEBAR	Kapal Penangkapan	D	ID-CPIB-K-52-250790

Sumber Data : Aplikasi SIAP MUTU

Kegiatan pada telah dilaksanakan dan telah mencapai target capaian kinerja tahun 2025.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu Stasiun KIPM Bima tidak memiliki anggaran DIPA yang menunjang kegiatan tersebut dan keterjangkauan sarana dan prasarana serta keterbatasan personel yang terjun langsung mensurvey lokasi kegiatan yang akan inspeksi.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan inspeksi akan tetap dilakukan melalui daring maupun luring dengan mengkondisikan personel yang ada dan Unit Pelaksanaan Teknis menggunakan sumber dana anggaran APBN, dari DIPA anggaran Balai KIPM Mataram.

IKU.2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten baik dalam bentuk sertifikat.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Tabel 10 Target dan Capaian IKU Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Renstra BPPMHKP 2020-2024 (KEP BADAN NOMOR 29 TAHUN 2024)	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV	%	% Terhadap Target 2024	% Capaian thd Target akhir Renstra
-	-	-	-	100	70	70	100	120	120	120

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah indikator yang mengukur pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$X = \frac{A + B + C}{xn} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point

(HACCP) ruang lingkup produk

- B** = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP diatas standar
- C** = Persentase surat keterangan penerapan HACCP yang diterbitkan pada unit distribusi ikan dan/atau supplier
- Xn** = Jumlah dari unsur pembentuk

Pada Tahun 2025 IKU Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan dilakukan perhitungan oleh Pusat Mutu Pascapanen melalui perhitungan Tingkat Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025. Realisasi Indikator Kinerja Stasiun KIPM Bima terhadap Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan sebesar **100 Persen** dari target **70 Persen** berdasarkan berdasarkan Data Laporan Capaian Kinerja dari Ketua Tim Kerja Pascapanen, yaitu :

Tabel 11 SKHS HACCP Tahun 2025

NO.	NAMA UPI	PRODUK	GRADE	NOMOR SERTIFIKAT
1	PT. BERKAT NISA SURA BIMA	Dried Seaweed	B	2/30.0/SKV/07/25

Sumber Data : Aplikasi SIAP MUTU



Gambar 14 Kegiatan Surveilen PT. Berkat Nisa Sura Bima

Kegiatan pada telah dilaksanakan yaitu memperoleh 1 Surat Keterangan Hasil Surveilen PT. Berkat Nisa Sura Bima.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu Stasiun KIPM Bima tidak memiliki anggaran DIPA yang menunjang kegiatan tersebut dan keterjangkauan sarana dan prasarana serta keterbatasan personel yang terjun langsung mensurvey lokasi kegiatan yang akan inspeksi.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan inspeksi akan tetap dilakukan melalui daring maupun luring dengan mengkondisikan personel yang ada dan Unit Pelaksanaan Teknis menggunakan sumber dana anggaran APBN, dari DIPA anggaran Balai KIPM Mataram.

IKU.3 Rasio Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor

Pada semester pertama tahun 2025, produk perikanan Indonesia telah diterima di 1 negara dari total 3 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Capaian ini menunjukkan bahwa sektor perikanan Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Target indikator kinerja utama (IKU) tahun 2024 memang ditetapkan pada angka 1 negara, yang berarti hingga pertengahan tahun, target tersebut sudah berhasil tercapai. Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu 2 negara pada tahun 2024, terjadi penurunan jumlah negara tujuan ekspor. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan regulasi impor di beberapa negara, persaingan global yang semakin ketat, atau tantangan dalam pemenuhan standar mutu di beberapa pasar tertentu.

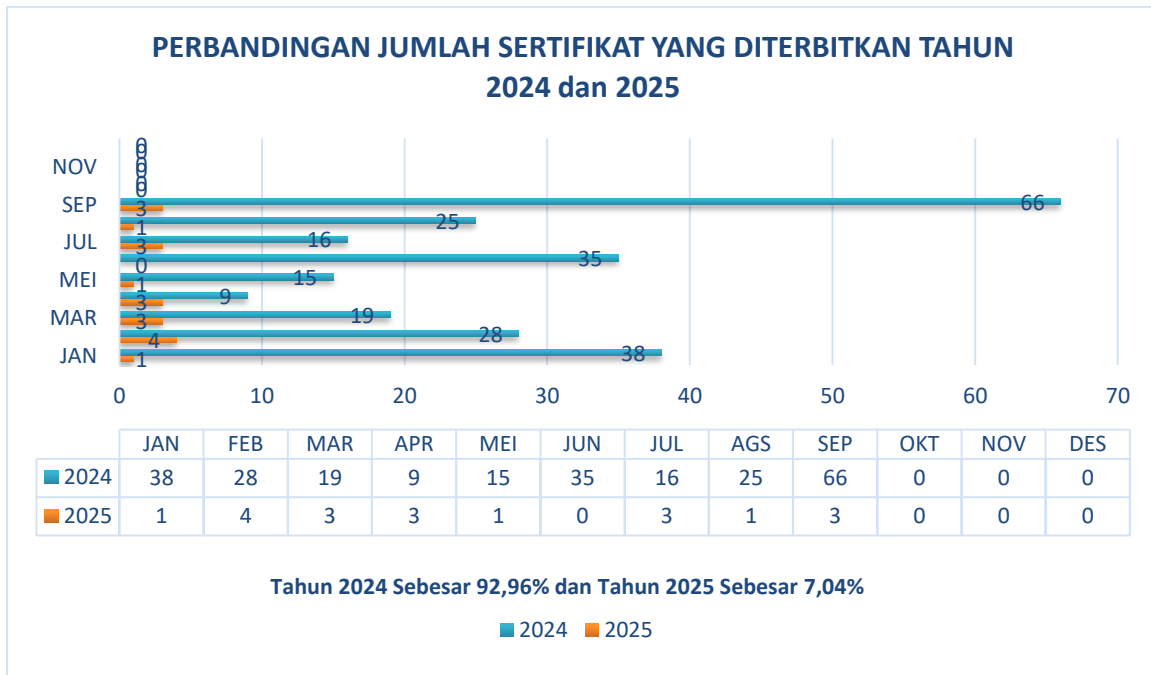
Tabel 12 Tabel Perbandingan Jumlah Sertifikat Ekspor ke Negara Tujuan Tahun 2024 dan 2025

No	Bulan	Jumlah Sertifikat Diterbitkan 2024	Jumlah Sertifikat Diterbitkan 2025
1	Januari	38 Sertifikat	1 Sertifikat
2	Februari	28 Sertifikat	4 Sertifikat
3	Maret	19 Sertifikat	3 Sertifikat
4	April	9 Sertifikat	3 Sertifikat
5	Mei	15 Sertifikat	1 Sertifikat
6	Juni	35 Sertifikat	-
7	Juli	16 Sertifikat	3 Sertifikat
8	Agustus	25 Sertifikat	1 Sertifikat
9	September	66 Sertifikat	3 Sertifikat
10	Oktober	-	-
11	November	-	-
12	Desember	-	-
Total		251 Sertifikat	19 Sertifikat

**Data hingga 31 Desember 2025*

Pada periode Januari hingga Desember 2025, jumlah Sertifikat Ekspor ke Negara Tujuan yang diterbitkan oleh Stasiun KIPM Bima menunjukkan tren penurunan signifikan dibanding periode yang sama tahun 2024. Tercatat sebanyak 19 sertifikat ekspor telah diterbitkan pada tahun 2025, terjadi penurunan sebesar 92,43% dari tahun 2025 dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Gambar 15 Tabel Perbandingan Jumlah Sertifikat Ekspor ke Negara Tujuan Tahun 2024 dan 2025



Penurunan jumlah sertifikat ekspor pada tahun 2025 di Stasiun KIPM Bima, jika dibandingkan dengan tahun 2024, dipengaruhi oleh beberapa faktor, berkurangnya jumlah supplier ekspor yang sebelumnya 3 menjadi 1 supplier ekspor berupa sargassum oleh PT Berkat Nisa Sura Bima.

Peta ekspor menunjukkan bahwa produk perikanan Indonesia tersebar ke berbagai wilayah utama dunia, termasuk Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada), Eropa (seperti Inggris, Belanda, Belgia, Jerman, Prancis, Spanyol, dan Italia), Asia (China, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura), Timur Tengah (Arab Saudi), serta Oseania (Australia). Hal ini mengindikasikan bahwa produk perikanan Indonesia telah berhasil masuk ke berbagai pasar strategis dunia, terutama di negara-negara dengan permintaan tinggi terhadap produk perikanan. Untuk menjaga dan meningkatkan keberterimaan produk perikanan di pasar global, diperlukan strategi yang lebih

agresif dalam mempertahankan serta memperluas pangsa pasar, terutama di negara-negara yang mengalami penurunan impor dari Indonesia. Selain itu, peningkatan kualitas, pemenuhan standar keamanan pangan internasional, serta diversifikasi produk ekspor perlu terus dilakukan agar dapat kembali mencapai atau bahkan melampaui capaian ekspor pada tahun sebelumnya.

Tabel 13 Target dan Capaian IKU Rasio Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor

Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Renstra BPPMHKP 2020-2024 (KEP BADAN NOMOR 29 TAHUN 2024)	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV	%	% Terhadap Target 2024	% Capaian thd Target akhir Renstra
-	-	-	100	100	99	99	100	101,01	101,01	101,01

Sasaran Strategis 02. Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun KIPM Bima

IKU.4 Presentase Penyelesaian Temuan BPK

Indikator Persentase Penyelesaian Temuan BPK merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai tingkat kepatuhan dan efektivitas tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Indikator ini menggambarkan sejauh mana Satuan Kerja Stasiun KIPM Bima mampu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja unit kerja secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2024, Satuan Kerja Stasiun KIPM Bima mencatat capaian sebesar 100% dalam penyelesaian temuan BPK. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan telah ditindaklanjuti secara menyeluruh melalui berbagai langkah strategis, seperti perbaikan dan penyempurnaan dokumen pertanggungjawaban, penyelarasan laporan keuangan, serta peningkatan koordinasi internal antara pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis, dan tim pengawasan internal.

Proses tindak lanjut dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada pedoman penyelesaian temuan BPK dan rekomendasi Inspektorat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Stasiun KIPM Bima juga melaksanakan evaluasi berkala terhadap progres penyelesaian temuan, memastikan setiap rekomendasi telah direspons dengan tindakan korektif yang sesuai.

Pencapaian 100% ini menjadi bukti nyata komitmen UPT Stasiun KIPM Bima dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap hasil audit, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas pengelolaan keuangan di lingkup Stasiun KIPM Bima.

Laporan lengkap mengenai penyelesaian temuan BPK dan hasil tindak lanjutnya dapat diperoleh secara resmi pada akhir tahun 2025, sebagai bagian dari laporan kinerja tahunan Stasiun KIPM Bima. Laporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan rekomendasi BPK sekaligus dasar evaluasi dalam peningkatan kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan program kerja pada tahun berikutnya.

Tabel 14 Target dan Capaian IKU Presentase Penyelesaian Temuan BPK

Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Renstra BPPMHKP 2020-2024 (KEP BADAN NOMOR 29 TAHUN 2024)	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV	%	% Terhadap Target 2024	% Capaian thd Target akhir Renstra
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

IKU.5 Indeks Profesionalitas ASN

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

IP ASN 2025 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024 →												
STASIUN KIPM BIMA			Cari									
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STASIUN KIPM BIMA	6	23.33	93.32 %	35	87.5 %	25	83.33 %	4.5	90 %	87.83	TINGGI

Gambar 16 IP ASN Stasiun KIPM Bima

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut :

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu/D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)
 - e. Pendidikan dibawah SLTA
3. Kompetensi
 - a. Diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir.

- b. Diukur dari Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami baik hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat.

IP ASN 2025

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2024

Silakan ketik NIP atau Nan

Cari

Download

1

troubleshooting permasalahan IP-ASN bisa dicek pada halaman berikut: [faq-troubleshooting-permasalahan-ip-asn](#)

#	Nama	Kualifikasi	Kompetensi							Kinerja		Disiplin		TOTAL	Keterangan
		Tingkat Pendidikan	IP	Kinerja	Diklat PIM	Diklat Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20 JP	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukuman Disiplin	IP		
1	JONISON PETRUS	S-1	25	20	10	-	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
2	KUKUH ANDIAS PURBIANTO	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	2	82	TINGGI
3	FITRA ADITYAWARMAN	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
4	DITA ANTONISA WIELNA	D-III	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
5	NURWAHYUNI WIDIASTUTI	S-1	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
6	HERI PURWANTO	S-1	25	20	10	-	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI

Gambar 17 IP ASN Pegawai Stasiun KIPM Bima

Dari penghitungan semua komponen tersebut, berikut Target dan Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Bima .

Tabel 15 Target dan Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN

Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Renstra BPPMHKP 2020-2024 (KEP BADAN NOMOR 29 TAHUN 2024)	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV	%	% Terhadap Target 2024	% Capaian thd Target akhir Renstra
-	-	84,12	86,25	87,83	82	82	89	108,54	102,13	108,54

Berdasarkan tabel target dan realisasi Tahun 2025, Stasiun KIPM Bima mulai menerapkan indikator Indeks Profesionalitas ASN sebagai indikator kinerja yang terukur. Pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, indikator ini belum memiliki target maupun data realisasi sehingga belum dapat dilakukan pengukuran kinerja secara kuantitatif. Dengan ditetapkannya target sebesar **82,50 Persen** pada Tahun 2025, pelaksanaan indikator Indeks Profesionalitas ASN dapat diukur secara lebih terstruktur. Hasil pelaksanaan Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2025 memenuhi standar yang ditetapkan, dengan realisasi capaian mencapai **89 Persen** terhadap target. Capaian ini sekaligus menjadi baseline pertama dan menunjukkan

efektivitas proses pengawasan, pembinaan, serta meningkatnya komitmen pelaku usaha dalam menerapkan standar mutu dan keamanan pangan di wilayah kerja Stasiun KIPM Bima.

Namun capaian Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan tren penurunan pada periode 2018–2022, dengan nilai terakhir sebesar 85 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, kinerja mengalami perbaikan dengan realisasi 86,25, melampaui target tahunan sebesar 84 atau mencapai 102,6%, serta menunjukkan peningkatan tipis dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Namun demikian, perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dan target jangka menengah yang tercantum dalam Renstra 2020–2024 belum disajikan secara lengkap, sehingga analisis capaian terhadap sasaran strategis jangka menengah masih perlu dilengkapi untuk memperoleh gambaran evaluasi kinerja yang utuh.

IKU.6 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja

Indikator ini adalah menghitung persentase dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jendral sebagai APIP sebagai hasil temuan dari pengawasan/evaluasi, dan menghitung tindak lanjut dari satker dalam menuntaskan temuan/rekomendasi ini.

Pada tahun 2021 Stasiun KIPM Bima telah dievaluasi sebanyak 2 kali oleh Itjen KKP atas pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada tahun 2021. Pekerjaan ini dievaluasi pada bulan September, kemudian dilakukan evaluasi Kembali di bulan Desember. Pekerjaan konstruksi menjadi perhatian karena adanya refofusing anggaran, yang membuat pekerjaan menjadi tidak bisa dibayarkan penuh pada tahun anggaran berjalan, namun dilakukan secara carry over.

Dari dua kali evaluasi oleh Itjen dikeluarkan 2 LHP dengan total terdapat rekomendasi. Dari 5 rekomendasi tersebut, semua telah dilakukan tindak lanjut menjawab rekomendasi yang diberikan. Atas tercapainya 5 tindak lanjut atas rekomendasi ini, maka diperoleh capaian THLP sebesar 100%.

Namun pada Tahun 2025 Stasiun KIPM Bima tidak terdapat belanja modal untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta tidak terdapat pekerjaan yang bersifat konstruksi berupa bangunan, dan yang menimbulkan adanya temuan. Sehingga pada Tahun 2025, jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah

ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran.

Formula Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja} \times 100\%}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}}$$

Tabel 16 Target dan Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja

Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Renstra BPPMHKP 2020-2024 (KEP BADAN NOMOR 29 TAHUN 2024)	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV	%	% Terhadap Target 2024	% Capaian thd Target akhir Renstra
100	100	100	100	100	85	85	100	117,65	120	117,65

Berdasarkan tabel target dan realisasi Tahun 2025 Indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik pada tahun 2025. Pada tahun tersebut, target sebesar 85 Persen dapat terlampaui dengan realisasi mencapai 100 Persen atau setara dengan nilai capaian sebesar 117,65 Persen dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi dari hasil pengawasan telah dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar tindak lanjut dan perbaikan proses kerja di lingkungan Stasiun KIPM Bima. Konsistensi capaian 100 persen selama dua tahun berturut-turut mencerminkan komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas kinerja dan penguatan tata kelola organisasi.

IKU.7 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik Survey Kepuasan Masyarakat (e-survey

SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Dengan capaian nilai IKM ini, Stasiun KIPM Bima berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sarana prasarana, serta inovasi layanan berbasis digital, sehingga pelayanan yang diberikan semakin cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

Tabel 17 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Stasiun KIPM Bima

Indikator	Nilai	Kategori
Nilai Mutu Pelayanan	97,44	Sangat Baik
Mutu Pelayanan	A	-
Jumlah Responden	13	-
Rata-rata Unsur Pelayanan		
Persyaratan Pelayanan	96,15	Sangat Baik
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	100	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian Pelayanan	96,15	Sangat Baik
Biaya/Tarif Pelayanan	98,08	Sangat Baik
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	98,08	Sangat Baik
Kompetensi Pelaksana	98,08	Sangat Baik
Perilaku Pelaksana	96,15	Sangat Baik
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	98,08	Sangat Baik
Sarana dan Prasarana	86,15	Sangat Baik
Indeks SKM	3,90	Sangat Baik



Predikat Sangat Baik untuk hasil survey IKM lingkup Stasiun KIPM Bima Tahun 2025 ini dapat dicapai dikarenakan meningkatnya kepatuhan responden dalam mengisi questioner Survey Kepuasan Masyarakat. Stasiun KIPM Bima tetap konsisten melakukan perubahan dan peningkatan pada setiap unsur pelayanan baik petugas pelayanan, sarana dan prasarana, serta sistem pelayanan yang dikemas melalui salah satu bentuk pelayanan yaitu "SIAP Melayani". Seluruh Pegawai lingkup Stasiun KIPM Bima juga telah berkomitmen untuk melaksanakan "SIAP Melayani", sesuai dengan kebijakan, standard dan prosedur-prosedur pelayanan yang telah ditetapkan dengan penandatanganan pakta integritas. Stasiun KIPM Bima juga telah menerapkan beberapa sistem manajemen yang mengacu kepada standar internasional untuk mendukung peningkatan kinerja layanan dengan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017. Berikut capaian dan target :

Tabel 18 Target dan Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Renstra BPPMHKP 2020-2024 (KEP BADAN NOMOR 29 TAHUN 2024)	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV	%	% Terhadap Target 2024	% Capaian thd Target akhir Renstra
-	-	3,71	3,70	3,80	3,36	3,36	3,90	116,07	113,10	116,07

IKU.8 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Stasiun KIPM Bima memperoleh nilai 86,55 dengan predikat A

(Sangat Baik). Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan SAKIP di lingkungan Stasiun KIPM Bima telah dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan melalui aplikasi Kinerjaku dengan melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada seluruh komponen penilaian, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Proses penilaian dilakukan secara objektif dan didukung oleh kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang relevan, serta menunjukkan adanya keterkaitan yang konsisten antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan realisasi capaian kinerja.

Capaian nilai SAKIP dengan predikat A (Sangat Baik) tersebut mencerminkan komitmen Stasiun KIPM Bima dalam menerapkan manajemen kinerja berbasis hasil (result-based management) dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ke depan, Stasiun KIPM Bima akan terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi kinerja, serta penguatan budaya kinerja dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan SAKIP pada periode selanjutnya.

Gambar 18 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP pada Stasiun KIPM Bima

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot(%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	11.50	25.50
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	11.50	25.50
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	7.75	13.05
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	12.25	22.50
TOTAL		100.00	43.00	86.55
PREDIKAT			C	A



Tabel 19 Target dan Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP

Realisasi Tahun 2020-2024					Tahun 2025				Renstra BPPMHKP 2020-2024 (KEP BADAN NOMOR 29 TAHUN 2024)	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV	%	% Terhadap Target 2024	% Capaian thd Target akhir Renstra
-	-	-	-	81,30	86	86	86,55	100,64	99,15	100,64

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan melalui aplikasi Kinerjaku dengan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), UPT Stasiun KIPM Bima memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sebesar 86,55 dengan predikat A (Sangat Baik). Capaian tersebut merupakan hasil akumulasi penilaian atas empat komponen utama SAKIP, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

3.3 Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, telah dilakukan Upaya penyederhanaan dan efisiensi atas pemanfaatan sumber daya lingkup Stasiun KIPM Bima, antara lain:

- Pengurangan belanja bahan, pencetakan dan konsumsi. Pemanfaatan aplikasi collaboration office (www.portal.kkp.go.id) dalam korespondensi, sehingga menghemat biaya cetak dokumen dan memangkas waktu disposisi dari pimpinan kepada pegawai;

- b. Optimalisasi penggunaan media daring (zoom) untuk rapat, supervisi, sosialisasi lingkup Stasiun KIPM Bima. Penggunaan media daring sangat bermanfaat karena dapat melibatkan seluruh UPT dan pegawai Stasiun KIPM Bima dalam waktu yang sama;

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran awal Stasiun KIPM Bima Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2,754,000,000,-. Dari total anggaran tersebut, tidak terdapat realisasi anggaran belanja pada satuan kerja Stasiun KIPM Bima pada Tahun Anggaran 2025. Dikarenakan pada tahun anggaran 2025 Stasiun KIPM Bima tidak memiliki DIPA. Sehingga alokasi anggaran yang semula telah dianggarkan dialihkan ke satker Balai KIPM Mataram.

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Stasiun KIPM Bima Tahun 2025

NO	SATKER	PAGU	BLOKIR EFESIENSI	PAGU EFEKTIF (SETELAH EFESIENSI)	REALISASI TW IV	% REALISASI	% REALISASI PAGU EFEKTIF
1	STASIUN KIPM BIMA	2,754,000,000	-	-	-	-	-
Total		2,754,000,000	-	-	-	-	-

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Stasiun KIPM Bima menetapkan 2 (dua) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi target Stasiun KIPM Bima di Tahun 2025. Nilai Kinerja Organisasi Stasiun KIPM Bima Tahun 2025 sebesar 111.13% dengan kategori “Istimewa” yang diperoleh dari capaian 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan targetnya pada Tahun 2025. Alokasi anggaran awal Stasiun KIPM Bima tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp2,754,000,000,-. Dari total anggaran tersebut, tidak terdapat realisasi anggaran belanja pada satuan kerja Stasiun KIPM Bima pada Tahun Anggaran 2025. Dikarenakan pada tahun anggaran 2025 Stasiun KIPM Bima tidak memiliki DIPA. Sehingga alokasi anggaran yang semula telah dianggarkan dialihkan ke satker Balai KIPM Mataram.

4.2 Langkah-langkah Perbaikan

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya, Stasiun KIPM Bima akan melaksanakan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta pengembangan pengetahuan terkait pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan, sertifikasi, pelayanan publik, dan pengelolaan kinerja;
- b. Mengoptimalkan diseminasi informasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha perikanan melalui media sosial, website, kegiatan sosialisasi, dan penyebaran informasi terkait jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.;
- c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan mutu hasil perikanan melalui penguatan koordinasi dengan instansi terkait, pelaku usaha, dan pemerintah daerah guna mendukung pemenuhan standar mutu dan keamanan hasil perikanan;

- d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan layanan sertifikasi, pengelolaan data, pelaporan kinerja, serta monitoring dan evaluasi kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaksanaan tugas;
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui percepatan pelaksanaan kegiatan, pengendalian realisasi anggaran secara berkala, serta monitoring capaian indikator kinerja agar target tahunan dapat tercapai secara optimal;
- f. Memperkuat penerapan sistem pengendalian intern dan pembangunan zona integritas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas;
- g. Meningkatkan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan dalam penerapan standar mutu dan keamanan hasil perikanan, termasuk CBIB, CPIB, HACCP, SKP, serta sertifikasi lainnya yang menjadi kewenangan Badan Mutu KKP.

BAB V LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Jonison Petrus**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Bima



Ditandatangani
Secara Elektronik

Jonison Petrus

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	99
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	100
		5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Indeks)	82
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	86
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	85
		8.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Indeks)	3.36

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2.595.000.000
2.	Manajemen Mutu	65.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	94.000.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Bima Tahun 2025		2.754.000.000

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Bima



Ditandatangani
Secara Elektronik

Jonison Petrus

Rincian Target Indikator Kinerja (IKU)
Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun Anggaran 2025

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Target							
		TW I	TW II	SM I	TW III	s.d TW III	TW IV	SM II	Tahun
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan								
IKS.01	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	70	70	70	70	70	70	70
IKS.02	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	70	70	70	70	70	70	70
IKS.03	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	99	99	99	99	99	99	99	99
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
IKS.02.1	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
IKS.02.2	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Indeks)	87	87	87	87	87	87	87	87
IKS.02.3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	85	85	85	85	85	85	85	85
IKS.02.4	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	88	88	88	88	88	88	88	88

Bima, 3 Februari 2025
Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Bima



Jonison Petrus, S.STPi
NIP. 19800812 200502 1 001

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SKIPM BIMA 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN/ PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUPUT BULANAN											
							JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
PENGENDALIAN MUTU																		
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Rekap dokumen Surveilens HACCP;	-	Sertifikat	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
			b	Penerapan Standar Mutu dan Keamanan	70						70	70	70	70	70	70	70	70
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Penerbitan Sertifikat Produk Primer	-	Sertifikat	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
			b	Penerbitan SMKHP; Verifikasi dan Penandatanganan SMKHP	70						70	70	70	70	70	70	70	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Jumlah Permohonan Ekspor yang diterima oleh Negara Tujuan Ekspor	-	Sertifikat	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
			b	Penerbitan SMKHP; Verifikasi dan Penandatanganan SMKHP	99						99	99	99	99	99	99	99	
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP BPPMHKP																		
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, linah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Bima	-	Persenn	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Indeks)	a						Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Bima	-	Nilai	87	87	87	87	87
		b			Kegiatan Pelatihan; IP individual ASN	87	87	87	87	87	87						87	87
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Rekomendasi hasil pengawasan yang di manfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Bima	-	Persen	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
			7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	a						Laporan SKM Pertriwulan	88	88	88	88	88	88	88



LAPORAN MONEV RENAKSI TRIWULAN I STASIUN KIPM BIMA TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA				KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN/ PAGU (Rp)		SATUAN OUTPUT/ KOMPONEN		TARGET OUTPUT/ KOMPONEN		CAPAIAN OUPUT BULANAN													
														TW-1		TW-2		SMT-1		TW-3		s/d TW-3		TW-4		s/d TW-4	
														TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP
PENGENDALIAN MUTU																											
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Rekap dokumen Surveilens HACCP;	-	Sertifikat	70	0	-																	
				b	Penerapan Standar Mutu dan Keamanan																						
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Penerbitan Sertifikat Produk Primer	-	Sertifikat	70	0	-																	
				b	Penerbitan Sertifikat Produk Primer																						
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Jumlah Permohonan Ekspor yang diterima oleh Negara Tujuan Ekspor	-	Sertifikat	99	100	100																	
				b	Penerbitan SMKHP; Verifikasi dan Penandatanganan SMKHP																						
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP BPPMHKP																											
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Bima	-	Persenn	100	0	-																	
				b	Kegiatan Pelatihan; IP individual ASN																						
		5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Indeks)	a	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Bima	-	Nilai	87	0	-																	
				b	Kegiatan Pelatihan; IP individual ASN																						
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Rekomendasi hasil pengawasan yang di manfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Bima	-	Persen	85	100	100																	
		7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	a	Laporan SKM Pertriwulan	-	Persen	88	94,68	94,68																	



LAPORAN MONEV RENAKSI TRIWULAN II STASIUN KIPM BIMA TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA				KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN/ PAGU (Rp)		SATUAN OUTPUT/ KOMPONEN		TARGET OUTPUT/ KOMPONEN		CAPAIAN OUPUT BULANAN													
														TW-1		TW-2		SMT-1		TW-3		s/d TW-3		TW-4		s/d TW-4	
														TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP
PENGENDALIAN MUTU																											
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Rekap dokumen Surveilens HACCP;	-	Sertifikat	70	0	-	70	100															
			b	Penerapan Standar Mutu dan Keamanan																							
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Penerbitan Sertifikat Produk Primer	-	Sertifikat	70	0	-	70	100															
			3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a														Jumlah Permohonan Ekspor yang diterima oleh Negara Tujuan Ekspor	-	Sertifikat	99	100	100	99	100	
		b	Penerbitan SMKHP; Verifikasi dan Penandatanganan SMKHP																								
		DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP BPPMHKP																									
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Bima	-	Persenn	100	0	-	0	-															
			5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Indeks)	a														Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Bima	-	Nilai	87	0	-	87	87,83	
		b			Kegiatan Pelatihan; IP individual ASN																						
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Rekomendasi hasil pengawasan yang di manfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Bima	-	Persen	85	85	100	85	100															
																				7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	a	Laporan SKM Pertriwulan	-	Persen	88	88

Bima, 7 Juli 2025
Kepala SKIPM Bima

Jonkron Perpus
NIP. 19800512 200502 1 001



LAPORAN MONEY RENAKSI TRIWULAN III STASIUN KIPM BIMA TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA				KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN/ PAGU (Rp)		SATUAN OUTPUT/ KOMPONEN		TARGET OUTPUT/ KOMPONEN		CAPAIAN OUPUT BULANAN													
														TW-1		TW-2		SMT-1		TW-3		s/d TW-3		TW-4		s/d TW-4	
														TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP
PENGENDALIAN MUTU																											
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Rekap dokumen Surveilen HACCP;	-	Sertifikat	70	0	-	70	100	70	100	70	100											
				b	Penerapan Standar Mutu dan Keamanan																						
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Penerbitan Sertifikat Produk Primer	-	Sertifikat	70	0	-	70	100	70	100	70	100											
				b	Penerbitan SMKHP; Verifikasi dan Penandatanganan SMKHP																						
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Jumlah Permohonan Ekspor yang diterima oleh Negara Tujuan Ekspor	-	Sertifikat	99	100	100	99	100	99	100	99	100											
				b	Penerbitan SMKHP; Verifikasi dan Penandatanganan SMKHP																						
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP BPPMHKP																											
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Bima	-	Persenn	100	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-									
				b	Kegiatan Pelatihan; IP individual ASN																						
		5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Indeks)	a	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Bima	-	Nilai	87	0	-	87	87,83	87	87,83	0	-	0	-									
				b	Kegiatan Pelatihan; IP individual ASN																						
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Rekomendasi hasil pengawasan yang di manfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Bima	-	Persen	85	85	100	85	100	85	100	85	100	85	100									
				b	Kegiatan Pelatihan; IP individual ASN																						
7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	a	Laporan SKM Pertriwulan	-	Persen	88	88	94,68	88	91,96	88	91,96	88	95,90	88	95,90											

Bima, 6 Oktober 2025
Kepala SKIPM Bima

Jonson Perpus
NIP. 19800512 200502 1 001



LAPORAN MONEV RENAKSI TRIWULAN IV STASIUN KIPM BIMA TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA			KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN/ PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/ KOMPONEN	CAPAIAN OUPUT BULANAN													
									TW-1		TW-2		SMT-1		TW-3		s/d TW-3		TW-4		s/d TW-4	
									TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP
PENGENDALIAN MUTU																						
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Rekap dokumen Surveilen HACCP;	-	Sertifikat	70	0	-	70	100	70	100	70	100	70	100	70	420	70	420
				b	Penerapan Standar Mutu dan Keamanan																	
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Penerbitan Sertifikat Produk Primer	-	Sertifikat	70	0	-	70	100	70	100	70	100	70	100	70	100	70	100
				b	Penerbitan SMKHP; Verifikasi dan Penandatanganan SMKHP																	
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Jumlah Permohonan Ekspor yang diterima oleh Negara Tujuan Ekspor	-	Sertifikat	99	100	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100
				b	Penerbitan SMKHP; Verifikasi dan Penandatanganan SMKHP																	
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP BPPMHKP																						
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Bima	-	Persenn	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100	100	100	
				5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Indeks)																	a
		b	Kegiatan Pelatihan; IP individual ASN																			
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	a	Rekomendasi hasil pengawasan yang di manfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Bima	-	Persen	85	85	100	85	100	85	100	85	100	85	100	85	100	85	100
				6	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Indeks)																	
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	a	Pengisian LKE pada Aplikasi Kinerjaaku TA 2025	-	Nilai	86	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	86	86,55	86	86,55

Bima, 15 Januari 2026
Kepala SKIPM Bima



dpd/psn P.06/05
SUP-198/06/12 200502 1 001

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BIMA
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 1 : Persentase Hasil Kelautan Dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70	70		70
Realisasi	0	100	100	380	40	420	420	100	
% Capaian	0	100%	100%	380%	40%	420%	420%	420%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- BPPMHKP Bima saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan,

optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :
 - a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
 - b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
 - c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
 - d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
 - e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
 - f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
- Pada Triwulan IV tahun 2025 BPPMHKP Bima hanya melakukan sertifikasi terhadap satu jenis sertifikasi yaitu :
 - a. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB).
- Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. Kegiatan CBIB dilaksanakan pada 5 lokasi yaitu pelaksanaan Inspeksi pada tanggal 16 Juli 2025 Lokasi CV. Alfa Segara Makmur di Kabupaten Dompu NTB, dengan Kode KBLI (03254) Pembesaran Crustacea Air Payau (Udang Vannamei). Selanjutnya kegiatan Inspeksi tanggal 23 Juli 2025 berlokasi di PT. Mitradelta Bahari Pratama yang berlokasi di Desa Sempunggu Kabupaten Bima, NTB, dengan kode KBLI (03254) Pembesaran Crustacea air payau. Selanjutnya kegiatan Surveil CBIB pada tanggal 04 Agustus 2025 secara Remot di Lokasi CV. Sape Sukses Bersama Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah pembesaran crustacea air payau (udang Vannamei) Kode KBLI 03254. Selanjutnya Surveil di Subhan Farm dan Abdul Khalik farm pada tanggal 19 Agustus 2025 dengan komoditas ikan air tawar yaitu ikan lele dan ikan nila, pembesaran ikan air tawar di kolam (Kode KBLI 03229)
- Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A + B + C + D + E + F}{xn} \times 100\%$$

- %X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB
B = Jumlah Unit menerapkan CPIB
C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB
E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
F = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
Xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

$$\%X = \frac{A}{xn} \times 100\% = \%X = \frac{4}{10} \times 100\% = 40\%$$

- Output dari kegiatan ini terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Hasil Surveil CBIB sebanyak 4
- Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

Akar Masalah
Untuk Kegiatan Surveilans CBIB petambak masi berbentuk UMKM dan juga tidak memiliki dokumen lengkap Inspeksi sebelumnya.
Tindakan yang telah dilaksanakan
- Pada tanggal 19 Agustus 2025 Inspektur Mutu BPPMHKP Bima telah melaksanakan Surveilans CBIB di dua lokasi yang berdekatan Subhan Farm dan Abdul Khalik Farm; - Pada tanggal 28-29 Agustus 2025 Inspektur Mutu SKIPM Bima Melaksanakan Inspeksi CPIB Kapal sebanyak 23 kapal Nelayan dibawah 5 gt dengan cara self assesment;

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan dan Dinas Perikanan di Wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu guna mendapatkan data dan melakukan percepatan sertifikasi primer	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Q4 Tahun 2025

I. Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi CBIB di Triwulan III Tahun 2025

No.	Nama UPR	Produk	Grade	No. Sertifikat
1	UD. Prima	Udang Vannamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)	C	ID-CBIB-NB-P-000581
2	Dr. Alief Firyasa Farm	Udang Vannamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)	C	ID-CBIB-NB-P-000574
3	CV. Kamboto Arujiki	Udang Vannamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)	C	ID-CBIB-NB-T-000869
4	CV. Sullindo Persada	Udang Vannamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)	C	ID-CBIB-NB-T-000870



Bima, 07 Januari 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja

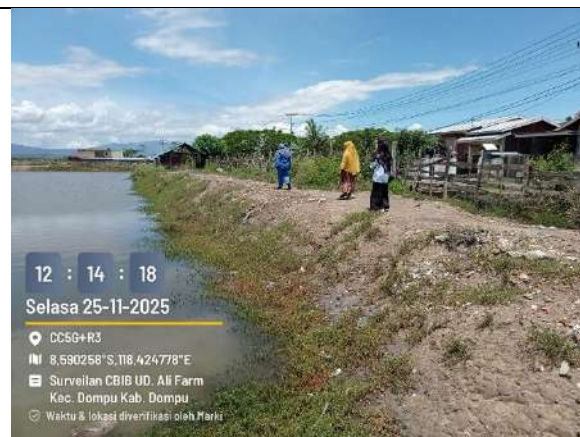
Dita Antonisa Wielna

Dokumentasi Kegiatan

Surveilien CBIB Lokasi UD. Prima



Surveilien CBIB dr. Alier Firyasa Farm



Kegiatan Surveilen CBIB CV. Kamboto Arujiki dan CV. Sullindo Persada





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA
JALAN LINTAS SUMBAWA, TALABU, WOHA, BIMA-NTB
LAMAM www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK : skipmbima@kkp.go.id

SURAT KETERANGAN HASIL SURVEILENS

Dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama Unit Pembesaran : CV. Kamboto Arujiki
Alamat Unit Pembesaran : Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi
Nusa Tenggara Barat
Komoditi : Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*)
Nama Pemilik : Arfiah
Jenis Usaha : Menengah rendah

Dinyatakan konsisten dalam pelaksanaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai Laporan Hasil Surveilens; sehingga Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dengan Nomor ID-CBIB-NB-T-000869 tetap berlaku sampai masa berakhir sertifikat.



Bima, 23 Desember 2025
Kepala UPT Stasiun KIPM Bima,

Joniso Petrus, S. St. Pi
NIP. 198006122005021001

Tembusan :

1. Kepala Badan PPMHKP
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA
JALAN LINTAS SUMBAWA, TALABIU, WOHA, BIMA-NTB
LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK : skipmbima@kkp.go.id

SURAT KETERANGAN HASIL SURVEILENS

Dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama Unit Pembesaran : UD. Prima
Alamat Unit Pembesaran : Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu,
Provinsi NTB
Komoditi : Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*)
Nama Pemilik : M. Didik Ibnu M
Jenis Usaha : Menengah rendah

Dinyatakan konsisten dalam pelaksanaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai Laporan Hasil Surveilens, sehingga Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dengan Nomor ID - CBIB - NB - P - 000581 tetap berlaku sampai masa berakhir sertifikat.

Bima, 23 Desember 2025
Kepala UPT Stasiun KIPM Bima,

Joniso Petrus, S. St. Pi
NIP. 198006122005021001

Tembusan :

1. Kepala Badan PPMHKP
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA
JALAN LINTAS SUMBAWA, TALABIU, WOHA, BIMA-NTB
LAMAM www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK : skipmbima@kkp.go.id

SURAT KETERANGAN HASIL SURVEILENS

Dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama Unit Pembesaran : Dr. Alief Firyasa Farm

Alamat Unit Pembesaran : Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu,
Provinsi NTB

Komoditi : Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*)

Nama Pemilik : Abdullah

Jenis Usaha : Menengah rendah

Dinyatakan konsisten dalam pelaksanaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai Laporan Hasil Surveilens, sehingga Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dengan Nomor ID - CBIB - NB - P - 000574 tetap berlaku sampai masa berakhir sertifikat.



Bima, 23 Desember 2025

Kepala UPT Stasiun KIPM Bima,

Joniso Petrus, S. St. Pi

NIP. 198006122005021001

Tembusan :

1. Kepala Badan PPMHKP
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA
JALAN LINTAS SUMBAWA, TALABIU, WOHA, BIMA-NTB
LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK : skipmbima@kkp.go.id

SURAT KETERANGAN HASIL SURVEILENS

Dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama Unit Pembesaran : CV. Sullindo Persada
Alamat Unit Pembesaran : Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi
Nusa Tenggara Barat
Komoditi : Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*)
Nama Pemilik : Monika Megalina
Jenis Usaha : Menengah rendah

Dinyatakan konsisten dalam pelaksanaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai Laporan Hasil Surveilens, sehingga Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dengan Nomor ID-CBIB-NB-T-000870 tetap berlaku sampai masa berakhir sertifikat.



Bima, 23 Desember 2025
Kepala UPT Stasiun KIPM Bima,

Joniso Petrus, S. St. Pi
NIP. 198006122005021001

Tembusan :

1. Kepala Badan PPMHKP
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BIMA TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan

Nama IKU 2 : Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Thn		
Target	70	70	70	70	70	70	70		70
Realisasi	0	100	100	100	100	100	100	100	
% Capaian	0	142,8%	142,8%	142,8%	142,8%	142,8%	142,8%	142,8%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2,Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

Sertifikasi Sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) :

- Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
- Sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) untuk produk perikanan adalah suatu sistem jaminan keamanan pangan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang dapat terjadi dalam proses produksi dan distribusi produk perikanan.
- Tujuan HACCP adalah untuk memastikan keamanan pangan produk perikanan dengan mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang dapat terjadi dalam proses produksi dan distribusi.

Isu Utama :

- Sertifikasi HACCP bertujuan untuk memastikan keamanan pangan produk perikanan dengan mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang dapat terjadi dalam proses produksi dan distribusi.
- Produk perikanan rentan terhadap kontaminasi bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan Vibrio, yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia.
- Penggunaan bahan tambahan yang tidak aman atau tidak tepat dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Implikasi :

- Sertifikasi HACCP dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan yang dihasilkan oleh perusahaan.
- Sertifikasi HACCP dapat meningkatkan daya saing perusahaan perikanan di pasar domestik dan internasional.
- Sertifikasi HACCP dapat mengurangi risiko keamanan pangan dan kerugian ekonomi yang terkait dengan produk perikanan yang tidak aman.
- Sertifikasi HACCP dapat meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan di kalangan perusahaan perikanan dan konsumen.

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan ikan (UPI). Upi yang dimaksud antara lain :
 1. Unit penanganan dan pengolahan ikan;
 2. Unit penanganan rumput laut kering;
 3. Gudang beku;
 4. Gudang dingin;
 5. Gudang kering, dan/atau
 6. Miniplant
- Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik (Online Single Submission)/Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 1. Sertifikat Pengolahan Ikan (SPI) atau Sertifikat keterampilan di bidang Keamanan Pangan yang setara untuk penanggungjawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil)
 2. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019).
 3. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Isu Utama :

1. Pada rancangan revisi Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lampiran I, KBLI perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang mengatur kewajiban SKP hanya terdapat 14 KBLI yang awalnya berjumlah 27 KBLI. Hal ini terjadi karena terdapat 13 KBLI berpindah perizinan berusaha sektor lainnya dibawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan Kementerian tersebut perihal kewajiban Unit Pengolahan Ikan yang melakukan penanganan dan/atau pengolahan ikan.
2. Dalam rangka pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui pembinaan dan pengendalian, pembinaan dan pengendalian tersebut dilakukan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kondisi saat ini, DJPDSPKP tidak memberikan anggaran ke pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, hal ini dapat berimplikasi terhadap capaian IKU sertifikasi SKP.
3. Pelaku usaha kesulitan melakukan permohonan sertifikasi melalui sistem OSS.
4. Verifikator SKP belum mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan verifikasi permohonan pelaku usaha di sistem OSS.
5. Petugas pemeriksa permohonan belum seluruhnya tepat waktu melakukan pemeriksaan setelah rekomendasi diupload pada SKP online

Implikasi :

1. Peningkatan kepercayaan konsumen: SKP dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan oleh fasilitas pengolahan.
 2. Peningkatan daya saing: SKP dapat meningkatkan daya saing fasilitas pengolahan pangan di pasar domestik dan internasional.
 3. Pengurangan risiko: SKP dapat mengurangi risiko keamanan pangan dan kerugian ekonomi yang terkait dengan produk pangan yang tidak aman.
 4. Peningkatan kesadaran akan keamanan pangan: SKP dapat meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan di kalangan fasilitas pengolahan pangan dan konsumen.
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen terdiri dari :
 - a. Sertifikasi Sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);
 - b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
 - c. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik
 - d. Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance
 - Pada Triwulan IV tahun 2025 BPPMHKP Bima terdapat realisasi capaian kinerja berupa Penerbitan SKHS (HACCP) dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

- Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A + B}{xn} \times 100\%$$

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
- Xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

$$\%X = \frac{A + B}{xn} \times 100\% = \%X = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

- Output dari kegiatan ini terdiri dari :
 - a. 1 Surat Keterangan Hasil Surveilien PT.Berkat Nisa Sura Bima
 - b. 1 Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) PT. Uta Mart
- Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

Akar Masalah

1. Dalam kegiatan Surveilien HACCP, pada dasarnya UPRL sudah menerapkan GMP/SSOP serta HACCP secara baik namun masih terdapat beberapa temuan ketidaksesuaian;
2. Permasalahan yang dihadapi pada sertifikasi SKP yaitu kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi untuk memenuhi standar keamanan pangan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Menginstruksikan kepada pelaku usaha agar meniadakanjuti semua temuan ketidaksesuaian pada saat surveilan HACCP;
2. Dukungan Pemerintah berupa pemberian kegiatan pelatihan serta pembinaan untuk membantu pelaku usaha agar dapat memenuhi standar sertifikasi.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan pemeriksaan tindakan perbaikan oleh pelaku usaha atas temuan ketidaksesuaian pada saat kegiatan Surveilien HACCP.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Q4 Tahun 2025

I. SKHS HACCP di Triwulan IV Tahun 2025

No.	Nama UPI	Produk	Grade	Nomor Sertifikat
1	PT BERKAT NISA SURABAYA	Dried Seaweed	B	3/30.0/SKV/12/25

II. Sertifikasi SKP di Triwulan IV Tahun 2025

No.	Nama UPI	Produk	Grade	Nomor Sertifikat
1	PT. UTA MART	Ikan Demersal Segar	B	41074/52/SKP/SG/XII/2025

Bima, 5 Januari 2026
Penanggung jawab Indikator Kinerja



Fitra Adityawarman

DOKUMENTASI SURVEILANCE HACCP PT BERKAT NISA SURA BIMA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 82/ITJ/RC.610/X/2025

Yth. : 1. Sekretaris Jenderal KKP
2. Para Dirjen lingkup KKP
3. Para Kepala Badan lingkup KKP
Dari : Inspektur Jenderal
Lampiran : Satu Halaman
Hal : Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP
Tanggal : 07 Oktober 2025

Bersama ini disampaikan capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan" lingkup KKP sebagai berikut :

1. Realisasi capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2024.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" sebesar 0,074%, realisasi tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan $\leq 0,5\%$. Adapun rincian capaian dari masing-masing Eselon I lingkup KKP disampaikan pada lampiran I.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Tajudin Sutiawarman

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan

Lampiran
 Nomor : 82/ITJ/RC.610/X/2025
 Tanggal : 07 Oktober 2025

**Rincian Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK
 atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024**

No.	Unit Kerja	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Nilai Realisasi Anggaran (Rp)	% (c/d)
a	b	c	d	e
1	Setjen	1.885.275.241,00	822.863.865.685,00	0,229
2	Ditjen PKRL	357.650.852,00	471.154.781.232,00	0,076
3	Ditjen PT	35.794.407,00	860.627.463.236,00	0,004
4	Ditjen PSDKP	50.381.000,00	995.498.070.995,00	0,005
5	Ditjen PB	368.007.712,00	992.008.206.671,00	0,037
6	BPPSDMKP	792.998.330,00	1.423.646.688.907,00	0,056
7	Ditjen PDSPKP	1.160.724.332,00	324.896.904.773,00	0,357
8	BPPMHKP	-	324.873.963.088,00	-
9	Itjen	-	84.427.641.894,00	-
	TOTAL	4.650.831.874,00	6.299.997.586.481,00	0,074



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Tajudin Sutiawarman

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Bima

Nama Unit Kerja : Stasiun KIPM Bima
 Periode Laporan : Triwulan IV
 Tahun : 2025

Uraian IK/IKU	TARGET 2025				REALISASI			
	Triwulan II	Semester I	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan II	Semester I	Triwulan III	Triwulan IV
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Bima	87	75	75	82	87.83	87.83	89	89
Rumus Perhitungan IKU : <i>IPASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i>								

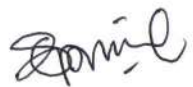
Uraian Capaian Indikator : Realisasi telah mencapai Target pada Triwulan IV

Mengetahui,
 Kepala Stasiun KIPM Bima



Jonison Petrus

Bima, 2 Januari 2026
 Penanggungjawab Indikator Kinerja



Nurwahyuni Widiastuti

STASIUN KIPM BIMA

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STASIUN KIPM BIMA	5	24	96 %	35	87.5 %	25	83.33 %	5	100 %	89	TINGGI

Silakan ketik NIP atau Nama

Cari

Download

 troubleshooting permasalahan IP-ASN bisa dicek pada halaman berikut: [faq-troubleshooting-permasalahan-ip-asn](#)

#	Nama	Kualifikasi		Kompetensi						Kinerja		Disiplin		TOTAL	Keterangan
		Tingkat Pendidikan	IP	Kinerja	Diklat PIM	Diklat Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20 JP	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukuman Disiplin	IP		
1	JONISON PETRUS	S-1	25	20	10	-	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
2	HERI PURWANTO	S-1	25	20	10	-	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
3	FITRA ADITYAWARMAN	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
4	DITA ANTONISA WIELNA	D-III	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
5	NURWAHYUNI WIDIASTUTI	S-1	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima**

Nama Unit Kerja : Stasiun KIPM Bima
Periode Laporan : Triwulan IV
Tahun : 2025

No	Instansi Pemeriksa/Pengawasan	LHP	Tanggal LHP	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Yang Tuntas Ditindaklanjuti
1	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor (outstanding Kontrak 2022) di Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (SKIPM) Bima Provinsi NTB	9 November 2021	2	2
2	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Hasil Pemantauan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor Tahun 2021 Stasiun KIPM Bima	3 Januari 2022	3	3
3	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Reviu Dokumen untuk Mendukung Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan Perikanan Tahun 2021 di Stasiun KIPM Bima	27 Februari 2022	8	8

4	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Reviu Penyelesaian Pekerjaan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2021 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	4 Maret 2022	3	3
JUMLAH				16	16
CAPAIAN IKU				100%	
$\text{Perhitungan IKU} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi}}{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Telah Tuntas Ditindak Lanjuti}} \times 100\% = \frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$					

Uraian Capaian Indikator : Semua hasil pengawasan telah di tindak lanjuti

Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Bima



Jonison Petrus

Bima, 2 Januari 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja



Nurwahyuni Widiastuti

SATUAN KERJA : STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA

Nilai Temuan Keuangan

Total Nilai Temuan Hasil Pengawasan

Rp13,816,876.36

Setoran Ke Kas Negara Tuntas per 07 Jan 2026

Rp13,816,876.36

Prosentase: 100.00%

Sisa temuan keuangan yang belum tuntas per 07 Jan 2026

Rp0.00 (https://sidak.kkp.go.id/daftar-nilai-peng

0.00%

NOTE:

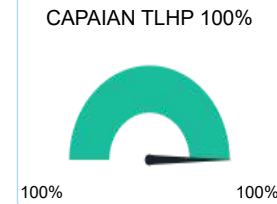
Segera lakukan proses tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang dapat dilaksanakan secara online. Kirim bukti tindak lanjut dengan mengupload dokumen bukti ke dalam sistem aplikasi SIDAK melalui Menu Manage TLHP.

Profil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Daftar LHP (https://sida...

Change Password (http...

Logout (https://sidak.kk...



STATUS : IKU Success

Temuan Hasil Pengawasan

JUMLAH KEJADIAN : 9

Kategori	Jumlah
Kepatuhan	: 2 Temuan (https://sidak.kkp.go.id/hasil-pengawasan-satuan-kerja/9/417/temuan-kepatuhan)
Kelemahan SPI	: 7 Temuan (https://sidak.kkp.go.id/hasil-pengawasan-satuan-kerja/9/417/temuan-kelemahan-spi)



Laporan Hasil Pengawasan

JUMLAH LHP : 4

Kategori	Jumlah
LHP BAB	: 1 LHP (https://sidak.kkp.go.id/hasil-pengawasan-satuan-kerja/9/417/lhp-bab)
LHP SURAT	: 3 LHP (https://sidak.kkp.go.id/hasil-pengawasan-satuan-kerja/9/417/lhp-surat)
CHR	: 0 CHR (https://sidak.kkp.go.id/hasil-



Rekomendasi/Saran

JUMLAH REKOM/SARAN : 16

Kategori	Jumlah
Tuntas	: 16 Rekom (https://sidak.kkp.go.id/hasil-pengawasan-satuan-kerja/9/417/rekomendasi-tuntas)
Proses	: 0 Rekom (https://sidak.kkp.go.id/hasil-pengawasan-satuan-kerja/9/417/rekomendasi-proses)



Jumlah Laporan : 4 Dokumen
Jumlah Temuan : 9 Temuan
Jumlah Rekomendasi : 16
Nilai Keuangan : Rp13,816,876

Tuntas : 16 Rekomendasi
Proses : 0 Rekomendasi
Pending : 0 Rekomendasi
Sisa Nilai Keuangan : Rp0

Search:

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
1823	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA	Pemantauan	R. 53/ITJ.4/HP.550/II/2022	2022-02-27	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Reviu Dokumen untuk Mendukung Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan Perikanan Tahun 2021 di Stasiun KIPM Bima	TUNTAS	Q Detail (.//hasil-pengawasan/satker/9/417/1823)
1810	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA	Reviu	R. 59/ITJ.4/HP.350/III/2022	2022-03-04	Reviu Penyelesaian Pekerjaan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2021 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	TUNTAS	Q Detail (.//hasil-pengawasan/satker/9/417/1810)
1772	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA	Pemantauan	R. 1/ITJ.4/HP.550/I/2022	2022-01-03	Hasil Pemantauan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor Tahun 2021 Stasiun KIPM Bima	TUNTAS	Q Detail (.//hasil-pengawasan/satker/9/417/1772)
1693	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA	Pemantauan	R. 1084/ITJ.4/HP.550/XI/2021	2021-11-09	Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor (outstanding Kontrak 2022) di Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (SKIPM) Bima Provinsi NTB	TUNTAS	Q Detail (.//hasil-pengawasan/satker/9/417/1693)

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : 1/BPPMHKP.1/RC.610/II/2026 02 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP

Yth.

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP;
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer, BPPMHKP;
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen, BPPMHKP;
4. Kepala UPT lingkup BPPMHKP.

di
tempat

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta memperhatikan Surat Deputy RB Kunwas Nomor B/641/AA.05/2024 Tanggal 19 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Poin 10 yang menyebutkan untuk mendorong peningkatan evaluasi AKIP internal unit organisasi Level II serta Surat Sekretaris BPPMHKP B.5339 / BPPMHKP.1/RC.610 /XI/2025 tanggal 18 November 2025 tentang Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP (yang dapat dilihat pada link <https://bit.ly/3K8mezW>) di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.
2. Target kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Tahun 2025 sebesar **Nilai 86, Sebanyak 49 UPT (96,07%) telah memenuhi target kinerja dan sisanya 2 UPT (3,93%) belum memenuhi target kinerja karena rendahnya capaian pada komponen Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP per Satker (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP adalah sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	BKIPM MATARAM	27.6	27.6	13.8	25	94	AA
2	SEKRETARIAT BPPMHKP	27	27	13.5	22.5	90	A
3	BBKIPM MAKASSAR	27	27	13.5	22.5	90	A
4	SKIPM BANDUNG	27	27	13.05	22.5	89.55	A
5	SKIPM ACEH	27.6	27	13.5	21.25	89.35	A
6	SKIPM JAMBI	27	27	12.15	23	89.15	A
7	PUSAT MANAJEMEN MUTU	27	27	12.6	22.5	89.1	A
8	SKIPM LUWUK BANGGAI	26.1	27	13.5	22.5	89.1	A
9	BUS-PM	27.6	25.2	13.5	22.5	88.8	A
10	BKIPM MEDAN I	27	27	12.15	22.5	88.65	A
11	SKIPM PALANGKARAYA	27	27	12.6	22	88.6	A
12	BKIPM TARAKAN	27	25.5	13.5	22.5	88.5	A
13	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER	27	27	13.5	21	88.5	A
14	PUSAT MUTU PASCA PANEN	27	27	13.5	21	88.5	A
15	BKIPM BANJARMASIN	27	25.5	13.5	22.5	88.5	A
16	SKIPM CIREBON	26.1	27	12.6	22.5	88.2	A
17	SKIPM PALEMBANG	27	25.5	13.05	22.5	88.05	A
18	SKIPM PONTIANAK	27	27	12.75	21.25	88	A
19	SKIPM PEKANBARU	27	27	13.5	20.5	88	A
20	SKIPM PALU	27	27	11.4	22.5	87.9	A
21	BKIPM SURABAYA II	27	27	12.6	21.25	87.85	A
22	SKIPM MEDAN II	27	26.4	11.85	22.5	87.75	A
23	SKIPM PADANG	27	25.5	12.6	22.5	87.6	A
24	BKIPM ENTIKONG	27	25.5	13.8	21.25	87.55	A
25	BKIPM BALIKPAPAN	27	27	13.5	20	87.5	A
26	SKIPM GORONTALO	27.6	24.6	12.6	22.5	87.3	A
27	SKIPM TAHUNA	26.1	27	11.7	22.5	87.3	A
28	BKIPM AMBON	27	25.5	13.5	21.25	87.25	A
29	SKIPM SORONG	25.5	26.1	13.05	22.5	87.15	A
30	SKIPM KUPANG	27	27	11.85	21.25	87.1	A
31	SKIPM PANGKAL PINANG	27	27	11.85	21.25	87.1	A
32	BKIPM MANADO	27	24	13.5	22.5	87	A
33	BKIPM SEMARANG	27	24	13.5	22.5	87	A
34	SKIPM YOGYAKARTA	27	24	13.5	22.5	87	A
35	BBKIPM JAKARTA I	27	27	12.9	20	86.9	A
36	SKIPM KENDARI	27	27	10.35	22.5	86.85	A
37	SKIPM TERNATE	27	27	12.3	20.5	86.8	A
38	SKIPM BENGKULU	27	25.5	13.05	21.25	86.8	A
39	SKIPM TJ. BALAI ASAHAN	25.2	27	11.85	22.5	86.55	A
40	SKIPM BIMA	25.5	25.5	13.05	22.5	86.55	A
41	BKIPM SURABAYA I	26.1	26.1	13.05	21.25	86.5	A
42	SKIPM MERAUKE	25.5	27	12.75	21.25	86.5	A
43	BKIPM LAMPUNG	27	25.2	13.5	20.75	86.45	A
44	SKIPM BATAM	27	25.5	12.9	21	86.4	A
45	BKIPM JAKARTA II	27	27	11.25	21	86.25	A
46	SKIPM MERAK	25.5	25.5	12.75	22.5	86.25	A
47	SKIPM MAMUJU	25.5	25.5	12.75	22.5	86.25	A
48	SKIPM BAU-BAU	26.1	27	11.85	21.25	86.2	A
49	BKIPM TANJUNG PINANG	24.9	27	12.75	21.5	86.15	A
50	BKIPM DENPASAR	27	24	12.6	21	84.6	A
51	BKIPM JAYAPURA	20.7	20.7	12	15.5	68.9	B

3. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP untuk Satker lingkup yang telah mencapai target (**≥86 Nilai**) yang telah ditetapkan pada tahun 2025.
4. Selanjutnya setiap satuan kerja (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP, khususnya untuk 20 Satker dengan dibawah target (**≤86 Nilai**) diminta untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dan saran pada Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP dalam hal pengelolaan dan pelaporan kinerja agar dapat mencapai target indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP periode Tahun 2026;
5. Rincian detail Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP UPT lingkup BPPMHKP Tahun 2025 dapat dilihat pada aplikasi Kinerjaku masing-masing satker.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n Kepala BPPMHKP
Plt. Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

**REALISASI CAPAIAN IKK RASIO EKSPOR IKAN DAN HASIL PERIKANAN MEMENUHI SYARAT MUTU DAN DITERIMA
OLEH NEGARA TUJUAN EKSPOR
UPT KIPM : STASIUN KIPM BIMA
TAHUN 2025**

Bulan : Oktober s.d Desember 2025 (Triwulan IV)

No.	Uraian IKK	Realisasi			Keterangan
		Jumlah Ekspor	Jumlah Penolakan oleh Negara Tujuan	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu	4	0	100	Selama bulan Oktober s.d Desember 2025 terdapat 4 kali ekspor dan diterima oleh negara tujuan ekspor dianggap memenuhi syarat 100%

Perhitungan IKU : $x = \frac{A-B}{A}$ (Rumus)

$x = \frac{\text{HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP} - \text{Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan}}{\text{HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP}}$

$$x = \frac{4-0}{4} = 100\%$$

Uraian Capaian Indikator : IKU mencapai target 100% pada Triwulan IV



Bima, 5 Januari 2026

Penanggung Jawab IKU,


Fitra Adityawarman



H 002920

THE REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIK INDONESIAMINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANCERTIFICATE OF QUALITY AND SAFETY FOR FISH AND FISHERY PRODUCT
SERTIFIKAT MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Consignor / Pengirim : Name / Nama : PT Berkas Nisa Sura Bima Address / Alamat : Dsn.Palikaja RT14/RW05 Desa: Laju, Kec: Langgudu				Reference Number Nomor Referensi: 30.0-S-00013-2025			
Consignee / Penerima : Name / Nama : QINGDAO ZHONGZHEN BIOTECHNOLOGY.CO.LTD Address / Alamat : BUILDING 2, UNIT 3, ROOM 502, KANGDA XIN CHENG APARTMEN, DALIAN ROAD OF JIAONAN,266400, QINGDAO, CHINA TEL/FAX: 861386425117				Competent Authority / Otoritas Kompeten: MARINE AND FISHERIES QUALITY ASSURANCE AGENCY (MFQAA) Certifying Body / Instansi Penerbit Sertifikat: Regional Marine and Fisheries Quality Assurance Agency Bima			
3. Origin Country of raw Material / Negara Asal Bahan Baku : Indonesia				4. Country of Destination / Negara tujuan: China			
5. Place of dispatch (Port) / Tempat pengeluaran (pelabuhan) : TANJUNG PERAK				6. Port of destination / Pelabuhan tujuan : QINGDAO			
7. Means of transport / Alat transport : Ship / Kapal				8. Transport condition / Kondisi transportasi :			
9. Identification of transport / Identitas alat transportasi : Name of transportation / Nama alat transportasi : AS PIA Transportation Number / Nomor alat transportasi : 541N				10. Date of departure / Tanggal pengiriman : October 8, 2025			
11. Intended uses of the product / Tujuan penggunaan product : Non edible / Non pangan				12. Source of raw material / Sumber bahan baku : Wild-Caught / Tangkap			
13. Producing Establishment / Unit Usaha : Name / Nama : PT. BERKAT NISA SURA BIMA Address / Alamat : Dsn Palikaja, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Establishment identity number / Nomor identitas unit usaha : 021/PM/HACCP/PK/07/24				14. Total Weight (kg) / Jumlah berat (kg) : 52000 Kgm 15. Total number and type of Packages / Jumlah dan jenis kemasan : 890 Bag; 16. Container and Seal Number / Nomor Kontainer dan Seal : FFAU 7104083 / ML ID 1356034;UETU 8458850 / ML ID 1356035;			
No.	Products Description Deskripsi produk	Common and Scientific Name Nama umum dan latin	Volume (kg) / (hds) Volume (kg) / (ekor)	Number of packages Jumlah kemasan	Type of packaging Jenis kemasan	Batch number Nomor Batch	Date of production Tanggal produksi
1	DRIED SARGASSUM SEAWEED	DRIED SARGASSUM SEAWEED / Sargassum sp.	52000	890	Bag	A.11 180825. SG A.09 080925. SG A.10 070925. SG A.11 050925. SG A.11 290825. SG A.11 050925. SG A.01 170925. SG A.11 140925. SG A.01 120925. SG A.11 021025. SG A.11 041025. SG	2025-08-18 2025-08-08 2025-09-07 2025-09-06 2025-08-29 2025-09-05 2025-09-17 2025-09-14 2025-09-12 2025-10-02 2025-10-04
Attestation / Pernyataan The undersigned Certifying Official certifies that the product(s) described above satisfy(s) the following requirements/ Pejabat penandatanganan sertifikat di bawah ini menyatakan bahwa produk yang diuraikan di atas memenuhi persyaratan berikut : ☒ a. The Product from each batch described above have been processed, inspected and graded in (an) establishment(s) that has been approved by and under control of the Competent Authority Produk telah diproses, diinspeksi dan dinilai di unit usaha yang telah mendapat persetujuan dan dilakukan pengawasan oleh Otoritas Kompeten ☒ b. have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a competent HACCP and sanitary programme consistently implemented and in accordance with the requirements laid down in Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003) telah ditangani, disiapkan atau proses, diidentifikasi, disimpan dan ditransportasikan sesuai persyaratan sanitasi dan HACCP yang diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products. (CAC/RCP 52-2003)							
QR CODE 				Date of issue / Dikeluarkan tanggal : Bima, October 8, 2025  Signature of the Official Inspector Tanda Tangan Inspektur Mutu ELTRA DOLYAWARMAN, S.Si.Pi			



H 002921

THE REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIK INDONESIAMINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANCERTIFICATE OF QUALITY AND SAFETY FOR FISH AND FISHERY PRODUCT
SERTIFIKAT MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Consignor / Pengirim : Name / Nama : PT Berkat Nisa Sura Bima Address / Alamat : Dsn. Palikaja RT 14/RW05 Desa: Laju, Kec: Langgudu		Reference Number Nomor Referensi: 30.0-S-00014-2025					
Consignee / Penerima : Name / Nama : QINGDAO ZHONGZHEN BIOTECHNOLOGY.CO.LTD Address / Alamat : BUILDING 2, UNIT 3, ROOM 502, KANGDA XIN CHENG APARTMENT, DALIAN ROAD OF JIAONAN, 266400, QINGDAO, CHINA TEL/FAX: 8613864251117		Competent Authority / Otoritas Kompeten: MARINE AND FISHERIES QUALITY ASSURANCE AGENCY (MFQAA) Certifying Body / Instansi Penerbit Sertifikat: Regional Marine and Fisheries Quality Assurance Agency Bima					
3. Origin Country of raw Material / Negara Asal Bahan Baku : Indonesia		4. Country of Destination / Negara tujuan: China					
5. Place of dispatch (Port) / Tempat pengeluaran (pelabuhan) : TANJUNG PERAK		6. Port of destination / Pelabuhan tujuan : QINGDAO					
7. Means of transport / Alat transport : Ship / Kapal		8. Transport condition / Kondisi transportasi : Ambient / Suhu Ruang					
9. Identification of transport / Identitas alat transportasi : Name of transportation / Nama alat transportasi : MARSA PRIDE Transportation Number / Nomor alat transportasi : 643N		10. Date of departure / Tanggal pengiriman : October 22, 2025					
11. Intended uses of the product / Tujuan penggunaan product : Non edible / Non pangan		12. Source of raw material / Sumber bahan baku : Wild-Caught / Tangkap					
13. Producing Establishment / Unit Usaha : Name / Nama : PT. BERKAT NISA SURA BIMA Address / Alamat : Dsn Palikaja, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Establishment identity number / Nomor identitas unit usaha : 021/PM/HACCP/PK/07/24		14. Total Weight (kg) / Jumlah berat (kg) : 52000 Kgm 15. Total number and type of Packages / Jumlah dan jenis kemasan : 890 Bag: 16. Container and Seal Number / Nomor Kontainer dan Seal : CAAU 7058467 / ML ID 1358268;MRSU 6607723 / ML ID 1358289;					
No.	Products Description Deskripsi produk	Common and Scientific Name Nama umum dan latin	Volume (kg) / (hds) Volume (kg) / (ekor)	Number of packages Jumlah kemasan	Type of packaging Jenis kemasan	Batch number Nomor Batch	Date of production Tanggal produksi
1	DRIED SARGASSUM SEAWEED	DRIED SARGASSUM SEAWEED / Sargassum sp.	52000	890	Bag	A.01 290925. SG A.10 300925. SG A.01 011025. SG A.10 031025. SG A.10 031025. SG A.11 031025. SG A.10 031025. SG A.10 051025. SG A.11 081025. SG A.02 121025. SG A.01 131025. SG	2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-03 2025-10-03 2025-10-03 2025-10-03 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-12 2025-10-13
Attestation / Pernyataan The undersigned Certifying Official certifies that the product(s) described above satisfy(s) the following requirements/ Pejabat penandatanganan sertifikat di bawah ini menyatakan bahwa produk yang diuraikan di atas memenuhi persyaratan berikut : ☒ a. The Product from each batch described above have been processed, inspected and graded in (an) establishment(s) that has been approved by and under control of the Competent Authority Produk telah diproses, diinspeksi dan dinilai di unit usaha yang telah mendapat persetujuan dan dilakukan pengawasan oleh Otoritas Kompeten ☒ b. have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a competent HACCP and sanitary programme consistently implemented and in accordance with the requirements laid down in Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003) telah ditangani, disiapkan atau proses, diidentifikasi, disimpan dan ditransportasikan sesuai persyaratan sanitasi dan HACCP yang diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003)							
QR CODE 				Date of Issue / Dikeluarkan tanggal : Bima, October 22, 2025  Signature of the Official Inspector Tanda tangan Inspektur Mutu FITRA ADITYA WARMAN, S.St.PI			



H 002923

THE REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIK INDONESIAMINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANCERTIFICATE OF QUALITY AND SAFETY FOR FISH AND FISHERY PRODUCT
SERTIFIKAT MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Consignor / Pengirim : Name / Nama : PT Berkat Nisa Sura Bima Address / Alamat : Dsn. Palikaja RT14/RW05 Desa: Laju, Kec: Langgudu				Reference Number Nomor Referensi: 30.0-S-00015-2025			
Consignee / Penerima : Name / Nama : QINGDAO ZHONGZHEN BIOTECHNOLOGY.CO.LTD Address / Alamat : BUILDING 2, UNIT 3, ROOM 502, KANGDA XIN CHENG APARTMENT, DALIAN ROAD OF JIAONAN, 266400, QINGDAO, CHINA TEL/FAX: 8613864251117				Competent Authority / Otoritas Kompeten: MARINE AND FISHERIES QUALITY ASSURANCE AGENCY (MFQAA) Certifying Body / Instansi Penerbit Sertifikat: Regional Marine and Fisheries Quality Assurance Agency Bima			
3. Origin Country of raw Material / Negara Asal Bahan Baku : Indonesia				4. Country of Destination / Negara tujuan: China			
5. Place of dispatch (Port) / Tempat pengeluaran (pelabuhan) : TANJUNG PERAK				6. Port of destination / Pelabuhan tujuan : QINGDAO			
7. Means of transport / Alat transport : Ship / Kapal				8. Transport condition / Kondisi transportasi :			
9. Identification of transport / Identitas alat transportasi : Name of transportation / Nama alat transportasi : MARSA PRIDE Transportation Number / Nomor alat transportasi : 548N				10. Date of departure / Tanggal pengiriman : November 26, 2025			
11. Intended uses of the product / Tujuan penggunaan product : Non edible / Non pangan				12. Source of raw material / Sumber bahan baku : Wild-Caught / Tangkap			
13. Producing Establishment / Unit Usaha : Name / Nama : PT. BERKAT NISA SURA BIMA Address / Alamat : Dsn Palikaja, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Establishment identity number / Nomor identitas unit usaha : 021/PM/HACCP/PK/07/24				14. Total Weight (kg) / Jumlah berat (kg) : 52000 Kgm 15. Total number and type of Packages / Jumlah dan jenis kemasan : 890 Bag; 16. Container and Seal Number / Nomor Kontainer dan Seal : MRSU 7626158 / ML ID 1100181;MRSU 7857970 / ML ID 1100182;			
No.	Products Description Deskripsi produk	Common and Scientific Name Nama umum dan latin	Volume (kg) / (hds) Volume (kg) / (ekor)	Number of packages Jumlah kemasan	Type of packaging Jenis kemasan	Batch number Nomor Batch	Date of production Tanggal produksi
1	DRIED SARGASSUM SEAWEED	DRIED SARGASSUM SEAWEED / Sargassum sp.	52000	890	Bag	A.11 161025. SG A.01 081025. SG A.01 081025. SG A.02 231025. SG A.11 231025. SG A.11 231025. SG A.01 261025. SG A.01 271025. SG A.10 301025. SG A.02 311025. SG A.01 311025. SG	2025-10-16 2025-10-08 2025-10-23 2025-10-23 2025-10-23 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-30 2025-10-31 2025-10-31

Attestation / Pernyataan

The undersigned Certifying Official certifies that the product(s) described above satisfy(s) the following requirements/
Pejabat penandatanganan sertifikat di bawah ini menyatakan bahwa produk yang diuraikan di atas memenuhi persyaratan berikut :

- ☒ a. The Product from each batch described above have been processed, inspected and graded in (an) establishment(s) that has been approved by and under control of the Competent Authority
Produk telah diproses, diinspeksi dan dinilai di unit usaha yang telah mendapat persetujuan dan dilakukan pengawasan oleh Otoritas Kompeten
- ☒ b. have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a competent HACCP and sanitary programme consistently implemented and in accordance with the requirements laid down in Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003)
telah ditangani, disiapkan atau proses, diidentifikasi, disimpan dan ditransportasikan sesuai persyaratan sanitasi dan HACCP yang diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003)

QR CODE



Date of Issue / Dikeluarkan tanggal : Bima, November 26, 2025

Signature of the Official Inspector
Tanda tangan Inspektur Mutu
FITRA ADITYAWARMAN, S.St.Pi



H 002924

THE REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

CERTIFICATE OF QUALITY AND SAFETY FOR FISH AND FISHERY PRODUCT
SERTIFIKAT MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Consignor / Pengirim: Name / Nama : PT Berkat Nisa Sura Bima Address / Alamat : Dsn.Palikaja RT14/RW05 Desa: Laju, Kec: Langgudu		Reference Number Nomor Referensi: 30.0-S-00016-2025					
Consignee / Penerima: Name / Nama : QINGDAO ZHONGZHEN BIOTECHNOLOGY.CO.LTD Address / Alamat : BUILDING 2, UNIT 3, ROOM 502, KANGDA XIN CHENG APARTMEN, DALIAN ROAD OF JIAONAN,266400, QINGDAO, CHINA TEL/FAX: 8613864251117		Competent Authority / Otoritas Kompeten: MARINE AND FISHERIES QUALITY ASSURANCE AGENCY (MFQAA) Certifying Body / Instansi Penerbit Sertifikat: Regional Marine and Fisheries Quality Assurance Agency Bima					
3. Origin Country of raw Material / Negara Asal Bahan Baku : Indonesia		4. Country of Destination / Negara tujuan: China					
5. Place of dispatch (Port) / Tempat pengeluaran (pelabuhan) : TANJUNG PERAK		6. Port of destination / Pelabuhan tujuan : QINGDAO					
7. Means of transport / Alat transport : Ship / Kapal		8. Transport condition / Kondisi transportasi : Ambient / Suhu Ruang					
9. Identification of transport / Identitas alat transportasi : Name of transportation / Nama alat transportasi : HYUNDAI UNITY Transportation Number / Nomor alat transportasi : 0177N		10. Date of departure / Tanggal pengiriman : December 22, 2025					
11. Intended uses of the product / Tujuan penggunaan product : Non edible / Non pangan		12. Source of raw material / Sumber bahan baku : Wild-Caught / Tangkap					
13. Producing Establishment / Unit Usaha : Name / Nama : PT. BERKAT NISA SURA BIMA Address / Alamat : Dsn Palikaja, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Establishment identity number / Nomor identitas unit usaha : 021/PM/HACCP/PK/07/24		14. Total Weight (kg) / Jumlah berat (kg) : 52000 Kgm 15. Total number and type of Packages / Jumlah dan jenis kemasan : 890 Bag: 16. Container and Seal Number / Nomor Kontainer dan Seal : HMMU 4020520 / 25 H 0033382;KOCU 4608696 / 25 H 0033381;					
No.	Products Description Deskripsi produk	Common and Scientific Name Nama umum dan latin	Volume (kg) / (hds) Volume (kg) / (ekor)	Number of packages Jumlah kemasan	Type of packaging Jenis kemasan	Batch number Nomor Batch	Date of production Tanggal produksi
1	DRIED SARGASSUM SEAWEED	DRIED SARGASSUM SEAWEED / Sargassum sp.	52000	890	Bag	A.11 051225.SG A.02 051225.SG A.01 091225.SG A.01 101225.SG A.11 121225.SG A.01 121225.SG A.02 131225.SG A.10 101125.SG A.01 091125.SG A.01 101125.SG A.11 231125.SG	2025-12-05 2025-12-05 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-12 2025-12-12 2025-12-13 2025-11-10 2025-11-09 2025-11-10 2025-11-23

Attestation / Pernyataan

The undersigned Certifying Official certifies that the product(s) described above satisfy(s) the following requirements/
Pejabat penandatanganan sertifikat di bawah ini menyatakan bahwa produk yang diuraikan di atas memenuhi persyaratan berikut :

- ☒ a. The Product from each batch described above have been processed, inspected and graded in (an) establishment(s) that has been approved by and under control of the Competent Authority
Produk telah diproses, diinspeksi dan dinilai di unit usaha yang telah mendapat persetujuan dan dilakukan pengawasan oleh Otoritas Kompeten
- ☒ b. have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a competent HACCP and sanitary programme consistently implemented and in accordance with the requirements laid down in Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003)
telah ditangani, disiapkan atau proses, diidentifikasi, disimpan dan diangkut sesuai persyaratan sanitasi dan HACCP yang diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003)

QR CODE



Date of issue / Dikeluarkan tanggal: Bima, December 22, 2025

Signature of the Official Inspector
Tanda tangan Inspektur Mutu
DITA ANTONISA WIELNA, A.Md

LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN BIMA
TRIWULAN IV TAHUN 2025



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II.....	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden.....	6
BAB III.....	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14
1. 14	
2. Hasil Pengolahan Data SKM	15
3. 15	
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/1301> yang disebarikan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Oktober 2025	8
2.	Pengumpulan Data	Oktober-Desember2025	66
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Desember 2025	3
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Desember 2025	3

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan III tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima dalam kurun waktu triwulan IV tahun 2025 adalah sebanyak 13 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 10 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 13 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	6	46%
		Perempuan	7	54%
2	Usia	<25	0	0%
		25-45	2	15%
		46-60	11	85%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	0	0%
		SMA	11	85%
		D3	0	0%
		S1	2	15%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	7	54%
		Pegawai Swasta	4	31%
		Wirausaha Non KKP	2	15%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%

		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	0	0%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	3	23%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	1	8%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	1	8%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	4	31%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	4	31%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

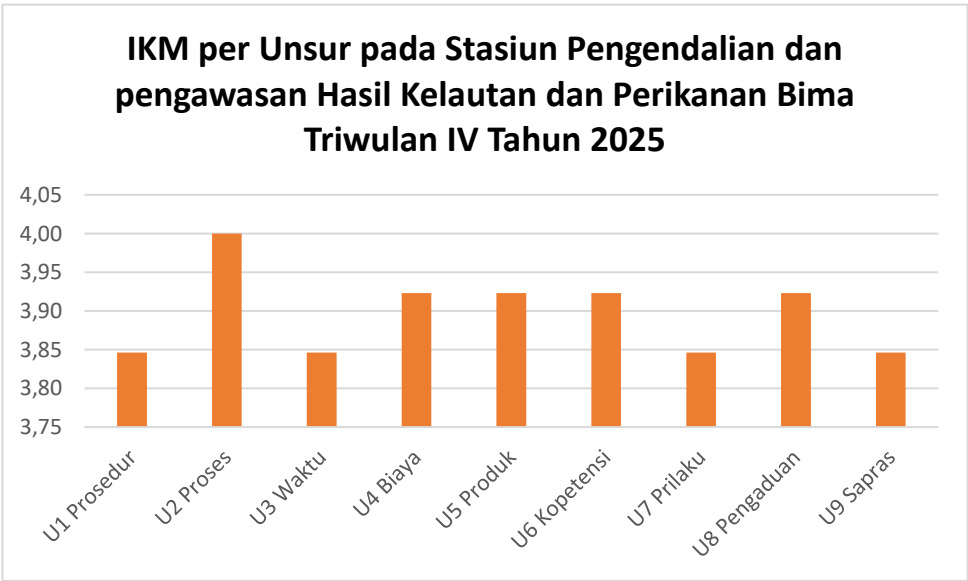
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,85	4,00	3,85	3,92	3,92	3,92	3,85	3,92	3,85
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	97,44 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Prosedur mendapatkan nilai terendah yaitu 3,85. Selanjutnya Waktu Penyelesaian mendapatkan nilai 3,85 adalah nilai terendah kedua dan Prilaku yang mendapatkan nilai 3,85 adalah nilai terendah ketiga.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Sistem, Mekanisme dan Prosedur, mendapatkan nilai tertinggi yaitu 4,00. Selanjutnya Biaya/Tarif 3,92 dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan mendapatkan nilai yaitu 3,92.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, tidak diperoleh aduan yang menjadi perhatian dan dipergunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Prosedur dalam pelaksanaannya sudah sesuai mungkin ada beberapa terkendala yang dialami oleh pengguna jasa dalam pemahaman prosedur.
- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun kendala jaringan dan kendala pada sistem aplikasi yang menghambat proses pelayanan.
- Prilaku pada petugas pelayanan harus ditingkatkan baik dari segi keramahan dan kesigapan dalam pelaksanaan pelayanan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal Januari/Februari/Maret 2026 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan I 2026)			Penanggung Jawab
			Januari	Februari	Maret	
1	Prosedur	Dalam pelaksanaan pelayanan petugas pelayanan harus selalu menjelaskan prosedur pelaksanaan kepada pengguna jasa dan memberikan kesempatan bertanya atau bersedia mengulangi penyampaian prosedur pelayanan ke pada pengguna jasa	√	√	√	Tim Pelayanan Publik.
2	Waktu Penyelesaian	Membuat kompensasi layanan (permintaan maaf, pemberian cenderamata, pemberian sanksi kepada petugas layanan dsb)			√	Tim Pelayanan Publik
3	Perilaku Petugas	Melakukan rapat internal dan mengkaji ulang SOP pelaksanaan Pelayanan		√		Kepala UPT dan Tim Pelayanan Publik

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan III 2025 sebesar 95,90 dan triwulan IV 2025 sebesar 97,44 pada Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan IV mulai Oktober hingga Desember 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 97,44.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Prosedur, Waktu Penyelesaian, dan Perilaku Petugas.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi Sistem, Mekanisme dan Prosedur, , Biaya/Tarif dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.

Bima, 06 Januari 2025

Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima



Yusuf Petrus, S. St.Pi
NIP. 198006122005021001

LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

Data Layanan

Pilih Layanan

☐ Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (Mata Analisis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)

☐ Penjaminan Keabsahan Rumi, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Fresh Certificate for Fish and Shrimp Product) untuk pengelaran dari Wilayah Pesisir Kepulauan Republik Indonesia (Elispet)

☐ Jasa penggepian hama penyakit ikan kepangina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air

☐ Penetapan Sertifikat Keagungan Pengalangan

☐ Penerbitan Sertifikat Penerapan ISO 9001:2015

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Pengalangan Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Pemberian Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Baiti Raya Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik

Data Responden

Waktu Survey

19-09-2025 13:19

Nama

Jenis Usaha

☐ Perseorangan

☐ Korporasi

Jenis Kelamin/Gender

☐ Pria/Laki-laki

☐ Wanita/Perempuan

Usia

☐ < 25 Tahun

☐ 25 s.d 45 Tahun

☐ 46 s.d 65 Tahun

☐ > 65 Tahun

Pendidikan

☐ SD☐ S1

☐ SMP☐ S2

☐ SMA☐ S3

☐ D3

Pekerjaan

☐ ASN☐ Pegawai Swasta

☐ TPA/POKJI

☐ Wiraswasta Non-KIP

☐ Instansi Lain

☐ Pengusaha Mahabir

Pernyataan

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
(Apakah setelah kami selesai dapat menerima pelayanan sesuai Persyaratan Sertifikat PMMT/HACCP yang sudah kami terima BPPN?)

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dilalui untuk mendapatkan layanan?

☐ Sangat Mudah

☐ Mudah

☐ Kurang mudah

☐ Tidak mudah

3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dipaparkan dengan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

5. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kesesuaian produk** pelayanan online yang ada pada aplikasi dengan pelayanan yang diberikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

6. Bagaimana **kecepatan respon** (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan?

☐ Sangat Cepat

☐ Cepat

☐ Kurang cepat

☐ Lambat

7. Bagaimana **kemudahan dalam penggunaan** fitur pada aplikasi sistem layanan?

☐ Sangat Mudah

☐ Mudah

☐ Kurang mudah

☐ Tidak mudah

8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia untuk mendapatkan kemudahan mendapatkan layanan?

☐ Sangat baik

☐ Baik

☐ Kurang baik

☐ Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kepatuhan** dari aplikasi sistem layanan?

☐ Sangat baik

☐ Baik

☐ Kurang baik

☐ Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah memberikan pelayanan secara prima (sikap, keterampilan dan penampilan)

☐ Sangat Baik

☐ Baik

☐ Kurang Baik

☐ Tidak Baik

Kritik dan Saran

70 karakter maksimal 3.440

Submit Form

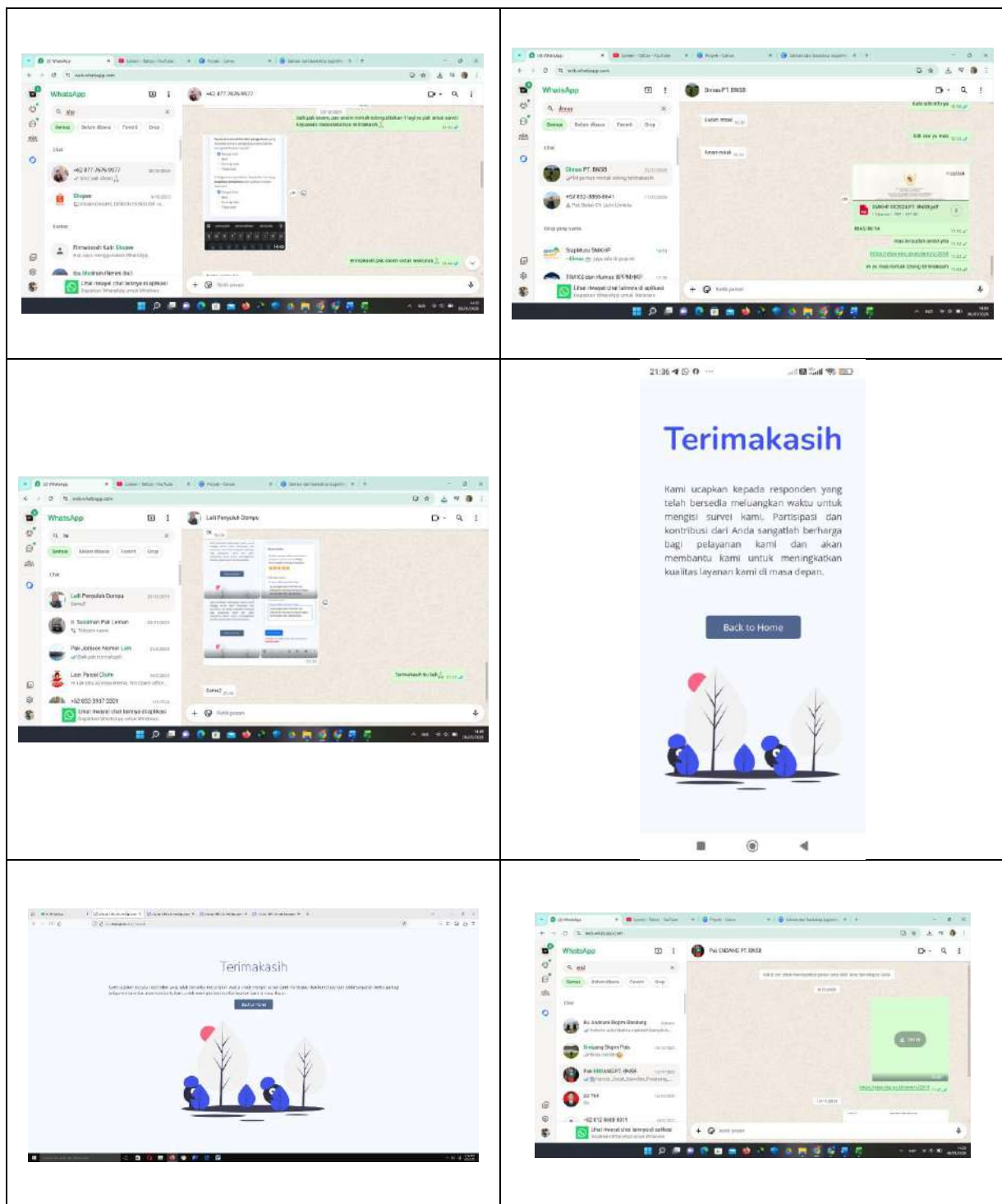
*) Petugas akan menilai secara otomatis **tidak ada**

2. Hasil Pengolahan Data SKM

TABEL PERHITUNGAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)																	
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA																	
PERIODE TRIWULAN IV 2025																	
NO	JENIS LAYANAN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	NILAI UNSUR PELAYANAN									KRITIK DAN SARAN	NILAI PER JENIS LAYANAN	NRR PER JENIS LAYANAN
						U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard	Perempuan	46-60	SMA	P.LIKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terima kasih atas bimbingan nya	100,00	97,44
2	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard	Laki-laki	46-60	SMA	Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Baik sekali pelayanannya	100,00	
3	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard	Perempuan	46-60	SMA	P.LIKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terimakasih sudah di bimbing	100,00	
4	Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	Laki-laki	25-45	S1	Swasta	3	4	3	4	4	4	4	4	4	Sangat Mudah	94,44	
5	Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	Laki-laki	25-45	SMA	P.LIKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Iya petugas telah memberikan pelayanan secara prima yaitu sikap ketrampilan dan penar	97,22	
6	Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	Laki-laki	46-60	S1	P.LIKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Iya petugas telah memberikan pelayanan secara prima yaitu sikap, ketrampilan dan penar	100,00	
7	Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	Perempuan	46-60	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pemakalah, bantu dan berikan arahan	100,00	
8	Penerbitan Sertifikat Cara Pemangsaan Ikan Yang Baik	Perempuan	46-60	SMA	P.LIKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Layanan konsultasi dan pengasutan yang mudah dimengerti	100,00	
9	Penerbitan Sertifikat Cara Pemangsaan Ikan Yang Baik	perempuan	46-60	SMA	Wirasaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat baik,baik dan benar benar baik	100,00	
10	Penerbitan Sertifikat Cara Pemangsaan Ikan Yang Baik	Perempuan	46-60	SMA	Wirasaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat baik,baik dan benar benar baik	100,00	
11	Penerbitan Sertifikat Cara Pemangsaan Ikan Yang Baik	Laki-laki	46-60	SMA	Swasta	3	4	3	3	3	3	3	3	3	Pertahankan terus kinerjanya	77,78	
12	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	46-60	SMA	P.LIKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat Sangat baik	100,00	
13	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	46-60	SMA	P.LIKKP	4	4	4	4	4	4	3	4	4	Terimakasih sudah di bimbing dan dibantu dalam proses ekspor	97,22	
JUMLAH NILAI PER-UNSUR						50	52	50	51	51	51	50	51	50	SANGAT BAIK	97,44	
RATA-RATA PER-UNSUR						3,85	4,00	3,85	3,92	3,92	3,92	3,85	3,92	3,85			
NILAI INDEKS PER-UNSUR						0,43	0,44	0,43	0,44	0,44	0,44	0,43	0,44	0,43			
NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT						97,44											

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	6	46%
		Perempuan	7	54%
2	Usia	Dibawah 25	0	0%
		25-45	2	15%
		46-60	11	85%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	0	0%
		SMA	11	85%
		D3	0	0%
		S1	2	15%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/Polri	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	7	54%
		Pegawai Swasta	4	31%
		Wirasaha Non KKP	2	15%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%
		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	0	0%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	3	23%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk	1	8%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	1	8%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	4	31%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	4	31%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM



4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat

Periode Triwulan III Tahun 2025



**Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan Bima
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk

mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima periode triwulan III tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan III Tahun 2025

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	97,02	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	96,43	A
3	Waktu Penyelesaian	95,24	A
4	Biaya/Tarif	95,24	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	95,83	A
6	Kompetensi Pelaksana	95,83	A
7	Perilaku Pelaksana	97,62	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	95,83	A
9	Sarana dan Prasarana	94,05	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk

memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

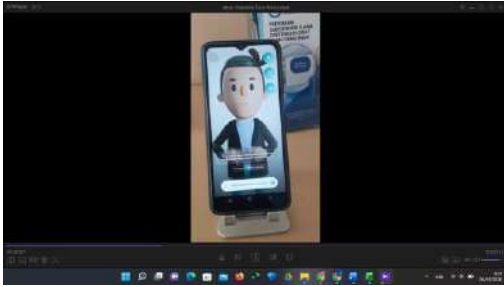
No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan IV 2025)			Penanggung Jawab
			Oktober	November	Desember	
1	U9-Sarana Prasarana	Sebelum melakukan pelayanan publik di kantor ataupun di lapangan petugas pelayanan harus mempersiapkan peralatan untuk turun ke lapangan sedangkan untuk ketersediaan sarana prasarana di kantor petugas pelayanan selalu memeriksa kelengkapan seperti kursi yang tersedia snack atau air yang tersedia di ruang pelayanan dan kebutuhan khusus bagi Penyandang disabilitas.	√	√	√	Kepala, Kepala Urusan Umum, dan Tim Pelayanan Publik.
2	U4-Biaya/Tarif	Sebelum melakukan pelayanan publik di kantor ataupun di lapangan petugas pelayanan harus menjelaskan biaya yang mungkin timbul dari proses pelayanan tersebut	√	√	√	Tim Pelayanan Publik

		dan apabila tidak ada pembayaran petugas juga harus menjelaskan bahwa tidak ada biaya dan petugas disarankan menanyakan kepada pengguna jasa apabila menyediakan hidangan ditanyakan apakah keberatan atau tidak				
3	U3-Waktu Penyelesaian	Membuat kompensasi layanan (permintaan maaf, pemberian cenderamata, pemberian sanksi kepada petugas layanan dsb)			√	Tim Pelayanan Publik

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
1	Sebelum melakukan pelayanan publik di kantor ataupun di lapangan petugas pelayanan harus mempersiapkan peralatan untuk turun ke lapangan sedangkan untuk ketersediaan sarana prasarana di kantor petugas pelayanan selalu memeriksa kelengkapan seperti kursi yang tersedia snack atau air yang tersedia di ruang pelayanan dan kebutuhan khusus bagi Penyandang disabilitas.	Sudah	Saat petugas Sertifikasi turun kelapangan peralatan harus siap untuk turun ke lapangan sedangkan untuk ketersediaan sarana prasarana di kantor petugas pelayanan selalu memeriksa kelengkapan seperti kursi yang tersedia snack atau air yang tersedia di ruang pelayanan dan kebutuhan khusus bagi Penyandang disabilitas.	 	Tidak ada Hambatan

2	Sebelum melakukan pelayanan publik di kantor ataupun di lapangan petugas pelayanan harus menjelaskan biaya yang mungkin timbul dari proses pelayanan tersebut dan apabila tidak ada pembayaran petugas juga harus menjelaskan bahwa tidak ada biaya dan petugas disarankan menanyakan kepada pengguna jasa apabila menyediakan hidangan ditanyakan apakah keberatan atau tidak	Sudah	Saat petugas Sertifikasi turun kelapangan selalu menjelaskan bahwa tidak ada biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan sertifikasi, serta petugas juga menanyakan tentang keberatan atau tidaknya pengguna jasa yang telah memberikan jamuan atau hidangan baik snack maupun makan berat.	 	Tidak ada hambatan saat pelaksanaan
3	Membuat kompensasi layanan (permintaan maaf, pemberian cenderamata, pemberian sanksi kepada petugas layanan dsb)	Sudah	Rapat pelaksanaan pelayanan public dengan ketepatan waktu		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :

N o	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggu ng Jawab	Stakeholder Terkait
1	Petugas pelayanan harus mempersiapkan peralatan yang akan dibawa saat turun kelapangan serta memperhatikan kelengkapan ruang pelayanan baik dari segi tempat duduk, air mineral serta snack.	Brefing sebelum kegiatan di lapangan dan mempersiapkan prasaranan di ruang pelayanan	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima
2	Petugas pelayanan harus menjelaskan biaya yang mungkin timbul dari proses pelayanan tersebut dan apabila tidak ada pembayaran petugas juga harus	Brefing sebelum kegiatan di lapangan	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima

	menjelaskan bahwa tidak ada biaya dan petugas disarankan menanyakan kepada pengguna jasa apabila menyediakan hidangan ditanyakan apakah keberatan atau tidak				
3	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU dsb)	Rapat dan pelatihan	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima

Bima, 06 Januari 2026

Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima



Johann Petrus, S. St.Pi
NIP. 198006122005021001



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : 98/BPPMHKP.1/HM.450/I/2026 12 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan IV tahun 2025 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Target yang ditetapkan pada Triwulan IV tahun 2025 adalah 88, sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah beberapa catatan dari hasil validasi nilai SKM:

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah **95,88** dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat **3,84** dan mutu pelayanan diperoleh **"A"** kategori **"Sangat Baik"**. Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 3.766 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam) responden yang melakukan survei.
2. Jumlah UPP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori sangat baik tercatat sebanyak 48 (empat puluh delapan) atau seluruhh UPP. Kemudian UPT Stasiun KIPM Batam, Stasiun KIPM Palu, dan Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan memperoleh nilai SKM tertinggi. Adapun tiga UPT dengan nilai SKM terendah adalah Stasiun KIPM Gorontalo, Stasiun KIPM Bengkulu, dan Stasiun KIPM Palangkaraya.

3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 13 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 2 layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu Sertifikat keikutsertaan dan final report (Uji Profisiensi) (87,50) dan Bahan acuan yang disertai dengan Certificate of Analysis (CoA) (87,61).
4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur	Nilai
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	96,36
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	96,02
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	95,99
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	96,02
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	96,06
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	95,31
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	95,51
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	96,14
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	95,49

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U9 (Sarana dan Prasarana) dan U7 (Perilaku Pelaksana).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala UPT dan Tim Pelayanan Publik BPPMHKP se-Indonesia. Pencapaian nilai SKM tertinggi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan buah sinergi dan kerja keras kolektif saudara sebagai garda terdepan. Layanan transparan, cepat, dan profesional yang konsisten dijalankan telah berhasil memperkokoh kepercayaan publik terhadap institusi kita. Terima kasih atas dedikasi luar biasa Bapak/Ibu dalam menjaga marwah pelayanan publik BPPMHKP.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Plt. Sekretaris Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 98/BPPMHKP.1/HM.450/I/2026

Tanggal : 12 Januari 2025

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP
5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Plt. Sekretaris Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025

NO	UPP	NILAI PER-UNSUR LAYANAN									NILAI SKM	INDEKS SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Stasiun KIPM Batam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,00	A	Sangat Baik	18	Online
2	Stasiun KIPM Palu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,00	A	Sangat Baik	22	Online
3	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,00	A	Sangat Baik	9	Online
4	Stasiun KIPM Ternate	100,00	100,00	99,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,94	4,00	A	Sangat Baik	48	Online
5	Stasiun KIPM Pekanbaru	99,73	99,73	99,80	99,60	99,73	99,73	99,66	99,80	99,80	99,73	3,99	A	Sangat Baik	373	Online
6	Balai KIPM Tarakan	99,39	100,00	100,00	99,39	99,39	99,39	100,00	100,00	99,39	99,66	3,99	A	Sangat Baik	41	Online
7	Balai KIPM Banjarmasin	99,53	99,53	99,21	99,53	99,84	99,53	99,69	99,84	99,84	99,62	3,98	A	Sangat Baik	159	Online
8	Stasiun KIPM Merauke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,83	100,00	100,00	100,00	99,54	3,98	A	Sangat Baik	6	Online
9	Balai KIPM Ambon	98,61	98,89	98,89	99,17	99,17	98,33	99,17	99,44	98,89	98,95	3,96	A	Sangat Baik	90	Online
10	Balai KIPM Mataram	98,61	99,07	99,07	98,61	99,07	98,61	97,69	98,15	98,61	98,61	3,94	A	Sangat Baik	54	Online
11	Balai Besar KIPM Makassar	98,60	98,55	98,32	98,32	98,43	98,27	98,32	98,49	98,32	98,40	3,94	A	Sangat Baik	447	Online
12	Balai KIPM Tanjung Pinang	99,01	97,52	98,51	99,34	97,35	97,85	97,19	99,34	98,68	98,31	3,93	A	Sangat Baik	151	Online

13	Stasiun KIPM Kendari	97,73	98,48	97,73	97,73	97,73	97,73	98,48	97,73	99,24	98,06	3,92	A	Sangat Baik	33	Online
14	Stasiun KIPM Pontianak	100,00	100,00	100,00	99,59	100,00	95,90	95,49	95,49	95,08	97,95	3,92	A	Sangat Baik	61	Online
15	Pusat Manajemen Mutu	100,00	96,88	96,88	96,88	96,88	96,88	100,00	96,88	100,00	97,92	3,92	A	Sangat Baik	8	Online
16	Balai KIPM Entikong	98,17	97,87	97,87	98,78	96,95	96,95	97,26	98,17	97,26	97,70	3,91	A	Sangat Baik	82	Online
17	Balai KIPM Jayapura	97,92	93,75	100,00	97,92	100,00	100,00	95,83	97,92	95,83	97,69	3,91	A	Sangat Baik	12	Online
18	Stasiun KIPM Merak	97,92	96,53	97,22	97,92	97,92	97,92	97,22	97,92	97,22	97,53	3,90	A	Sangat Baik	36	Online
19	Stasiun KIPM Bima	96,15	100,00	96,15	98,08	98,08	98,08	96,15	98,08	96,15	97,44	3,90	A	Sangat Baik	13	Online
20	Stasiun KIPM Tahuna	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	3,89	A	Sangat Baik	9	Online
21	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	97,31	97,04	97,04	97,04	97,04	97,04	96,77	97,85	97,58	97,19	3,89	A	Sangat Baik	93	Online
22	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	98,17	96,34	96,95	95,73	97,56	96,95	97,56	98,17	96,34	97,09	3,88	A	Sangat Baik	41	Online
23	Stasiun KIPM Sorong	93,42	95,39	95,39	94,74	97,37	99,34	100,00	99,34	98,68	97,08	3,88	A	Sangat Baik	38	Online
24	Balai KIPM Denpasar	96,60	96,25	96,74	96,88	96,60	95,96	96,25	96,46	96,67	96,49	3,86	A	Sangat Baik	353	Online
25	Balai KIPM Surabaya II	97,75	97,50	96,75	97,75	97,50	96,50	97,25	97,00	90,00	96,44	3,86	A	Sangat Baik	100	Online
26	Stasiun KIPM Aceh	98,44	96,88	96,88	93,75	95,31	96,88	95,31	98,44	95,31	96,35	3,85	A	Sangat Baik	16	Online
27	Balai KIPM Jakarta II	96,63	97,12	96,63	96,15	96,15	95,19	96,15	96,15	95,19	96,15	3,85	A	Sangat Baik	52	Online

28	Balai KIPM Balikpapan	95,40	95,40	97,00	95,00	96,20	92,80	94,60	97,20	97,00	95,62	3,82	A	Sangat Baik	125	Online
29	Stasiun KIPM Bau-Bau	95,97	97,58	95,16	94,35	94,35	93,55	95,97	93,55	94,35	94,98	3,80	A	Sangat Baik	31	Online
30	Stasiun KIPM Jambi	96,25	91,25	95,00	97,50	95,00	92,50	94,38	95,63	95,63	94,79	3,79	A	Sangat Baik	40	Online
31	Stasiun KIPM Mamuju	94,44	94,44	94,44	97,22	94,44	91,67	91,67	94,44	94,44	94,14	3,77	A	Sangat Baik	9	Online
32	Stasiun KIPM Medan II	95,59	94,75	93,91	94,12	93,49	93,91	93,28	93,70	93,28	94,00	3,76	A	Sangat Baik	119	Online
33	Stasiun KIPM Padang	95,83	95,83	95,83	91,67	91,67	95,83	91,67	95,83	87,50	93,52	3,74	A	Sangat Baik	6	Online
34	Stasiun KIPM Yogyakarta	95,59	94,85	89,71	93,38	94,85	92,65	92,65	94,12	93,38	93,46	3,74	A	Sangat Baik	34	Online
35	Stasiun KIPM Palembang	96,00	96,00	92,00	94,00	91,00	89,00	94,00	95,00	94,00	93,44	3,74	A	Sangat Baik	25	Online
36	Balai KIPM Medan I	95,10	96,08	94,12	93,63	95,10	93,14	94,12	92,65	85,29	93,25	3,73	A	Sangat Baik	51	Online
37	Stasiun KIPM Bandung	94,35	93,55	91,94	92,74	93,55	93,55	91,13	92,74	91,94	92,83	3,71	A	Sangat Baik	31	Online
38	Balai KIPM Semarang	94,21	91,05	93,16	94,74	94,47	88,68	88,68	93,16	92,11	92,25	3,69	A	Sangat Baik	95	Online
39	Balai KIPM Manado	91,30	91,85	91,30	92,39	92,93	91,30	92,93	94,02	91,30	92,15	3,69	A	Sangat Baik	46	Online
40	Balai KIPM Lampung	93,18	93,18	93,18	89,39	91,67	93,18	90,91	94,70	89,39	92,09	3,68	A	Sangat Baik	33	Online
41	Stasiun KIPM Kupang	91,31	91,31	91,49	90,43	91,67	91,31	91,13	91,67	92,20	91,39	3,66	A	Sangat Baik	141	Online
42	Balai Besar KIPM Jakarta I	91,67	91,44	91,44	90,28	91,90	90,74	90,97	90,51	91,20	91,13	3,65	A	Sangat Baik	108	Online

43	Stasiun KIPM Cirebon	91,79	91,60	91,03	91,79	90,65	90,08	89,69	90,84	90,27	90,86	3,63	A	Sangat Baik	131	Online
44	Balai Uji Standar KIPM	91,03	91,03	90,76	91,03	90,49	88,86	90,49	90,22	88,86	90,31	3,61	A	Sangat Baik	92	Online
45	Balai KIPM Surabaya I	92,31	90,60	90,17	91,67	90,38	88,25	89,10	90,81	89,32	90,29	3,61	A	Sangat Baik	117	Online
46	Stasiun KIPM Bengkulu	90,97	90,28	89,58	87,50	90,97	90,28	89,58	91,67	89,58	90,05	3,60	A	Sangat Baik	36	Online
47	Stasiun KIPM Palangkaraya	91,67	90,48	90,48	87,50	88,69	85,12	86,90	88,69	88,69	88,69	3,55	A	Sangat Baik	42	Online
48	Stasiun KIPM Gorontalo	88,48	88,20	88,20	88,20	88,48	88,76	88,20	88,20	88,20	88,33	3,53	A	Sangat Baik	89	Online

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Produk Layanan BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	6	95,83	95,83	91,67	91,67	91,67	91,67	95,83	95,83	91,67	93,52	A	Sangat Baik
2	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	2506	97,39	97,25	97,40	97,37	97,29	96,69	96,80	97,33	96,93	97,16	A	Sangat Baik
3	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	15	96,67	95,00	96,67	93,33	93,33	96,67	93,33	96,67	91,67	94,81	A	Sangat Baik
4	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	129	97,29	97,29	95,93	96,32	96,90	96,71	97,48	97,29	96,32	96,83	A	Sangat Baik
5	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)	258	95,54	94,38	93,99	93,90	94,28	92,83	93,99	95,06	94,19	94,24	A	Sangat Baik
6	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	121	94,21	93,18	92,77	93,39	92,77	91,94	91,74	93,18	92,56	92,86	A	Sangat Baik
7	Sertifikat pengesahan nomor registrasi (<i>approval number</i>)	8	100,00	96,88	96,88	96,88	96,88	96,88	100,00	96,88	100,00	97,92	A	Sangat Baik
8	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	398	93,72	93,53	92,78	93,03	93,09	92,15	92,15	93,15	91,65	92,80	A	Sangat Baik
9	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	250	92,60	91,40	91,80	92,00	92,70	91,40	91,30	92,20	91,10	91,83	A	Sangat Baik
10	Bahan acuan yang disertai dengan <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)	13	88,46	86,54	88,46	88,46	86,54	86,54	88,46	88,46	86,54	87,61	B	Baik
11	Sertifikat keikutsertaan dan <i>final report</i>	12	91,67	89,58	89,58	85,42	89,58	85,42	89,58	83,33	83,33	87,50	B	Baik
12	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	47	94,15	93,09	93,62	94,15	94,68	92,02	93,09	94,15	94,15	93,68	A	Sangat Baik

13	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,67	99,07	A	Sangat Baik
Seluruh Layanan BPPMHKP		3766	96,36	96,02	95,99	96,02	96,06	95,31	95,51	96,14	95,49	95,88	A	Sangat Baik



Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima

BIMA SIAP - Senyum, Iklas, Amanah dan Profesional

